

Katalog: 9199007.13
ISSN 2477-0817



Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023

Volume 29, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Katalog: 9199007.13
ISSN 2477-0817

<https://sumbar.bps.go.id>

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023

Volume 29, 2024 



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023 Volume 29, 2024

Katalog: 9199007.13

ISSN: 2477-0817

Nomor Publikasi: 13000.24062

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xii+67 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com dan www.flaticon.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tim Penyusun

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023
Volume 29, 2024

Pengarah
Sugeng Arianto

Penanggung Jawab
Eri Mardison

Penyunting
Lidya Sri Yeni
Dendy Nefrialdi
Indriane Analisa

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Nisrina Hakim
Rizka Aulia
Yuliana Livi Andam Putri
Rahmi Septia Putri
Muhamad Kanzu Satrio
Monica Putri Nelvenia
Retno Lis Megawati

Penata Letak dan Pembuat Infografis
Muhammad Arief Eko Pratama

Kata Pengantar

Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Dalam publikasi ini akan didapatkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian Sumatera Barat berdasarkan data tahun 2023.

Pada Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023 terdapat informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi, harga-harga, perdagangan luar negeri, moneter, penanaman modal, kunjungan wisatawan, dan perkembangan jumlah penduduk serta kesejahteraan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini mungkin masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Padang, Oktober 2024
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat



Sugeng Arianto



Daftar Isi

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023
Volume 29, 2024

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	x
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat.....	5
Bab 3 Perkembangan Harga-Harga	15
Bab 4 Ekspor dan Impor.....	25
Bab 5 Keuangan Daerah	35
Bab 6 Perbankan.....	43
Bab 7 Penduduk.....	51
Daftar Pustaka.....	67

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2022 dan 2023..... 8
2.2	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Pengeluaran (persen), 2022 dan 2023 10
2.3	Realisasi Investasi PMA menurut Sektor di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023..... 12
2.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat (kunjungan), 2017–2023 13
3.1	Inflasi Umum Menurut Bulan di Provinsi Sumatera Barat (2018=100) (persen), 2021–2023..... 17
3.2	Nilai Tukar Petani Sumatera Barat Menurut Subsektor, 2023..... 24
4.1	Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia, 2013–2023..... 28
4.2	Volume dan Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan yang Dimuat di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023..... 30
4.3	Struktur impor Sumatera Barat menurut Penggunaan Barang (US\$), 2019–2023 31
4.4	Volume dan Nilai Impor menurut Pelabuhan Bongkar Provinsi Sumatera Barat, 2019–2023..... 32
5.1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat (000 rupiah), 2022 dan 2023..... 37
6.1	Jumlah Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Barat, 2021–2023 46
6.2	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Sumatera Barat (juta rupiah), 2021–2023..... 47
6.3	Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat (juta rupiah), 2021–2023 48
6.4	Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Sumatera Barat (juta rupiah), 2022–2023 49

Tabel	Halaman
7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Sumatera Barat, 2023	54
7.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023	55
7.3 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2021–2023.....	56
7.4 Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2021–2023.....	58
7.5 Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin (jiwa), 2021–2023.....	59
7.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 dan 2023.....	60
7.7 Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat (rupiah), 2021–2023	61
7.8 Distribusi Pengeluaran dan Rasio Gini Penduduk di Provinsi Sumatera Barat, 2011–2023.....	62
7.9 Garis Kemiskinan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan), 2013–2023	63
7.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan), 2013–2023	65

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2022 dan 2023.....	8
2.2	Distribusi PDRB Provinsi Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2022–2023.....	9
2.3	Distribusi PDRB Provinsi Provinsi Sumatera Barat menurut Pengeluaran (persen), 2022 dan 2023.....	10
3.1	Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota, 2021.....	18
3.2	Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota, 2022.....	20
3.3	Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota, 2023.....	21
3.4	Nilai Tukar Petani Bulanan Sumatera Barat, 2023.....	23
4.1	Nilai Ekspor menurut Sektor Komoditas Provinsi Sumatera Barat (juta US\$), 2019–2023.....	29
4.2	Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat (juta US\$), 2019–2023.....	33
5.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2023.....	39
5.2	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Belanja (persen), 2023.....	40
5.3	Persentase Proporsi dan Perubahan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat (persen), 2023.....	41

Bab 1

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 kembali menunjukkan tren positif, **laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,62 persen.**



Seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Sumatera Barat pada tahun 2023 mengalami **pertumbuhan yang positif**, tertinggi adalah **sektor Jasa Lainnya sebesar 8,06 persen.**



Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ekonomi global belum sepenuhnya pulih setelah pandemi Covid-19. Meningkatnya ketegangan geopolitik, blok ekonomi yang memicu fragmentasi ekonomi serta fenomena El Nino memberikan tekanan terhadap inflasi. Ketegangan geopolitik meningkatkan ketidakpastian, disisi lain pertumbuhan ekonomi antar negara semakin melebar, semua ini berujung pada perlambatan ekonomi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia juga terdampak akibat kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi yang tercipta diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang turun masing-masing sebesar 0,54 persen poin dan 0,18 persen poin dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31 persen. Ekonomi nasional 2023 tumbuh ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat dari segi konsumsi. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 9,83 persen. Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen.

Perekonomian global yang melambat pada 2023 juga dialami oleh negara-negara di ASEAN. Dari sebelas negara ASEAN, sembilan negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Hanya Brunei Darussalam dan Laos yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi.

1.2 Gambaran Perekonomian Sumatera Barat 2023

Ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 kembali menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,62 persen, mengalami peningkatan 0,26 persen poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,36 persen. Seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya, sebesar 8,06 persen dan terendah pada Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 1,84 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,70 persen. Berdasarkan kontribusinya terhadap penyusunan PDRB, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tercatat memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar 21,04 persen dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen.

Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-24 tertinggi dari 38 provinsi untuk pertumbuhan ekonomi 2023 secara nasional dan menyumbang 1,52 persen terhadap perekonomian Indonesia.

1.3 Cakupan Laporan

Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 menyajikan informasi perkembangan indikator-indikator perekonomian yang menggambarkan kemajuan ekonomi secara umum. Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam 7 bab.

Bab 1 merupakan Pendahuluan yang menguraikan kondisi perekonomian secara umum. Pada Bab 2 terdapat perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor, impor, dan lain-lain. Sedangkan Bab 3 menampilkan perkembangan harga-harga, meliputi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi di Kota Padang. Bab 4 berisi ekspor dan impor serta neraca perdagangan. Sementara itu, Bab 5 menyajikan perkembangan keuangan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data perbankan, perhimpunan dana, dan posisi kredit perbankan terdapat pada Bab 6. Dan yang terakhir Bab 7 berisi perkembangan penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

<https://sumbar.bps.go.id>

Bab 2

TINJAUAN EKONOMI SUMATERA BARAT

4 Besar

Sektor penyumbang PDRB Provinsi Sumatera Barat 2023



21,04 persen

**Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan**



16,55 persen

**Perdagangan Besar
dan Eceran,
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor**



11,30 persen

**Transportasi
dan Pergudangan**



10,15 persen

Konstruksi

Sumber: BPS, Publikasi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023

Sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

semakin menunjukkan progres yang bagus.

Selama tahun 2023, **jumlah kunjungan wisatawan mancanegara** ke Sumatera Barat tercatat sebanyak **56.645 kunjungan**, mengalami peningkatan sebesar

1.266,92 persen.

Sumber: BPS, Publikasi Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024



Bab 2 Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit.

Penghitungan PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

2.1 PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Mulai tahun 2010 PDRB menurut lapangan usaha ini dirinci atas 17 (tujuh belas) kategori. Ekonomi Sumatera Barat di tahun 2023 mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan PDRB yakni sebesar 4,62 persen. Sementara itu, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 4,36 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen pada tahun 2023.

Jika laju pertumbuhan menurut lapangan usaha penyusun PDRB Sumatera Barat ditelaah lebih lanjut, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,06 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,71 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,64 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,29 persen, Jasa Perusahaan sebesar 6,88 persen, Real Estate sebesar 6,32 persen, Konstruksi sebesar 5,86 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,77 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah 5 (lima) persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki laju pertumbuhannya yang tetap positif yakni 3,54 persen dan kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat yakni 21,04 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi primadona dikarenakan pangan akan tetap terus dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupan dalam kondisi ekonomi bagaimanapun, walaupun kontribusinya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

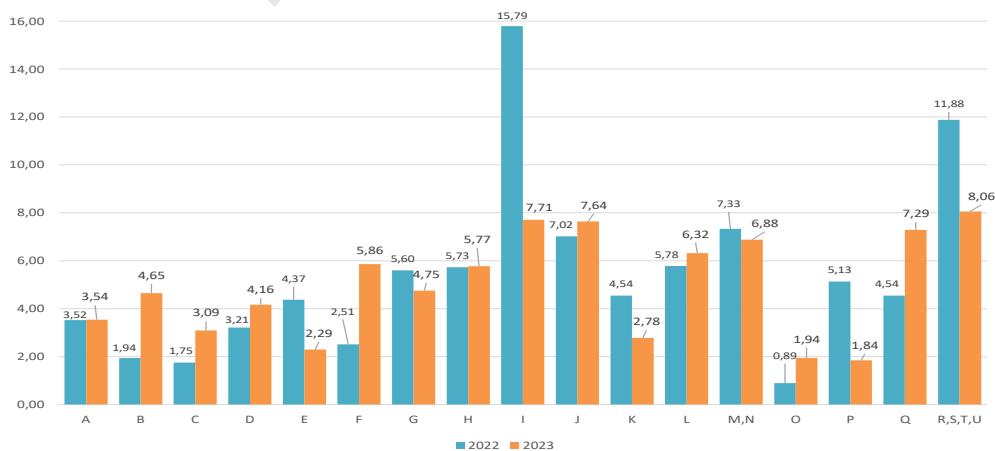
Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada di urutan kedua dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 16,55 persen. Kemudian, lapangan usaha Transportasi

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2022 dan 2023

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan		Distribusi PDRB	
		2022*	2023**	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	3,54	21,20	21,04
B	Pertambangan dan Penggalian	1,94	4,65	4,09	4,08
C	Industri Pengolahan	1,75	3,09	8,54	8,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,21	4,16	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	4,37	2,29	0,09	0,09
F	Konstruksi	2,51	5,86	10,06	10,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,60	4,75	16,50	16,55
H	Transportasi dan Pergudangan	5,73	5,77	10,88	11,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,79	7,71	1,35	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	7,02	7,64	6,68	6,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,54	2,78	3,23	3,08
L	Real Estate	5,78	6,32	2,02	2,08
M,N	Jasa Perusahaan	7,33	6,88	0,42	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,89	1,94	6,52	6,33
P	Jasa Pendidikan	5,13	1,84	4,62	4,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,54	7,29	1,65	1,70
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,88	8,06	2,05	2,11
PDRB		4,36	4,62	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

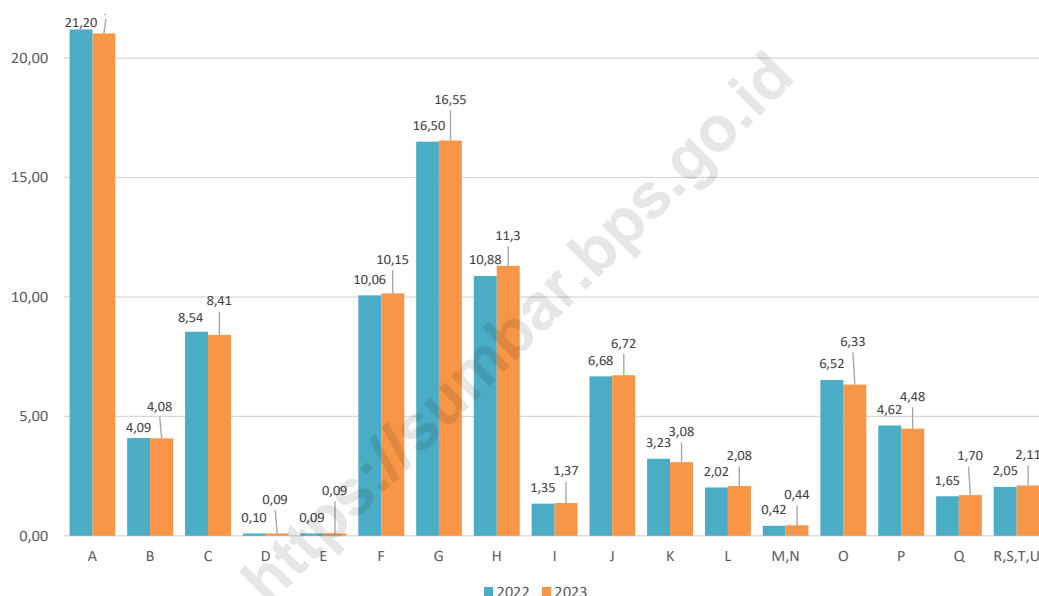
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2023



Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2022 dan 2023

dan Pergudangan memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 11,30 persen.

Di lain sisi, lapangan usaha yang memiliki peranan paling kecil terhadap distribusi PDRB di Provinsi Sumatera Barat adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,09 persen, baik tahun 2022 maupun 2023. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas juga memiliki peran yang kecil terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 0,09 persen, baik pada tahun 2022 maupun 2023.



Gambar 2.2 Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2022–2023

2.2 PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan seluruh komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor bersih (ekspor-impor) dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan pada hampir setiap komponen penyusun tumbuh positif. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut pengeluaran yang paling besar adalah komponen pengeluaran ekspor yaitu sebesar 7,92 persen. Komponen yang juga memiliki laju pertumbuhan tinggi dan berada di urutan kedua adalah pembentukan modal tetap bruto dengan laju pertumbuhan sebesar 7,70 persen. Selanjutnya, pertumbuhan komponen impor sebesar 6,94 persen.

Dilihat dari distribusi PDRB menurut pengeluaran, komponen ekspor merupakan yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut pengeluaran di tahun 2023 dengan andil sebesar 55,24 persen. Komponen yang memiliki distribusi yang cukup besar setelah pengeluaran ekspor adalah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2023, kontribusi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 52,09 persen. Namun, komponen ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 53,32 persen.

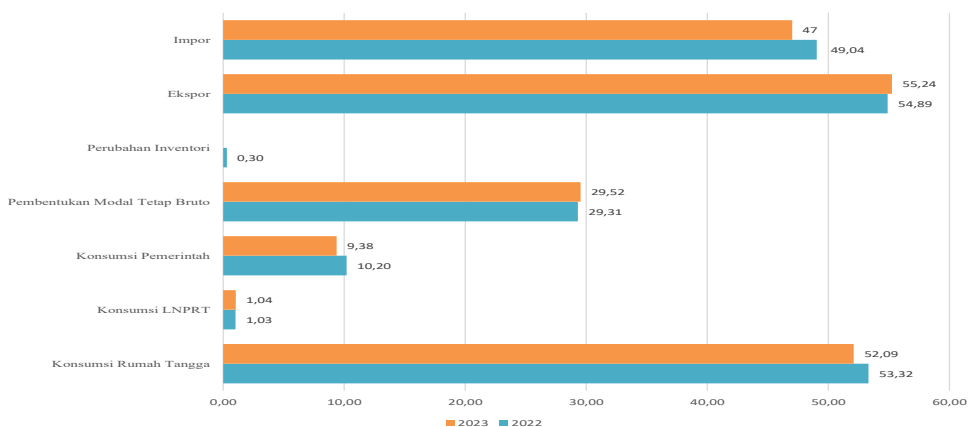
Selanjutnya, komponen yang memiliki distribusi PDRB terbesar ketiga adalah pengeluaran impor. Akan tetapi, komponen impor ini mengalami penurunan kontribusi terhadap distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut pengeluaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 49,04 persen menjadi 47,00 persen.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Pengeluaran (persen), 2022 dan 2023

Komponen (1)	Pertumbuhan		Distribusi PDRB	
	2022* (2)	2023** (3)	2022* (4)	2023** (5)
Konsumsi Rumah Tangga	4,12	3,22	53,32	52,09
Konsumsi LNPRT	-0,53	6,79	1,03	1,04
Konsumsi Pemerintah	-3,14	0,39	10,20	9,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,58	7,70	29,31	29,52
Perubahan Inventori	-	-	0,30	0,27
Ekspor	6,75	7,92	54,89	55,24
Impor	5,02	6,94	49,04	47,00

Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat menurut Pengeluaran 2023



Gambar 2.3 Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut Pengeluaran (persen), 2022 dan 2023

Sementara itu, distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Pada tahun 2023, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami sedikit penurunan menjadi 9,38 persen, dari sebelumnya 10,20 persen pada tahun 2022. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan jumlah dari seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, tidak termasuk atau dikurangi dengan hasil penjualan (penerimaan) dari produksi barang dan jasa (*output* pasar).

2.3 Penanaman Modal

Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menurun dari 2,56 triliun rupiah menjadi 4,49 triliun rupiah. Jumlah proyek juga meningkat di tahun 2023 ini. Investasi di sektor primer (tanaman pangan dan perkebunan) meningkat signifikan selama tahun 2023. Sejalan dengan sektor primer, investasi pada sektor sekunder juga mengalami peningkatan. Peningkatan paling signifikan tercatat pada industri makanan, di mana investasi pada subsektor ini pada tahun 2023 tercatat sebesar 454,65 miliar rupiah.

Selanjutnya, investasi pada sektor tersier juga mengalami peningkatan. Investasi pada sektor konstruksi mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Demikian halnya dengan sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi juga mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan mobilitas penduduk meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai investasi di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi ini pada tahun 2022 ini tercatat sebesar 406,56 persen.

Sebaliknya, investasi pada hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 56,40 persen. Selain itu, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran juga mengalami penurunan sebesar yakni sekitar 50,27 persen. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa investasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika kita lihat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 75,34 persen.

Secara agregat nilai PMA Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 meningkat nilainya yakni sekitar 26,18 persen atau bertambah US\$ 25,03 juta. Namun, jumlah proyek mengalami penurunan yakni sekitar 6,96 persen dibandingkan tahun 2022. Secara umum dapat dilihat bahwa investasi di sektor primer dan sektor tersier mengalami peningkatan yang cukup signifikan, masing-masing tercatat sebesar 18,79 persen dan 180,99 persen. Pada sektor primer, peningkatan investasi PMA paling tinggi terjadi pada pertambangan. Sementara itu, pada sektor tersier yang naik paling signifikan adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Sebaliknya, investasi pada sektor sekunder mengalami penurunan sebesar 2,97 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor industri kimia dan farmasi mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 75,52 persen.

Tabel 2.3 Realisasi Investasi PMA menurut Sektor di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Sektor	Uraian	2022		2023		
		Jumlah Proyek	Investasi (ribu US\$)	Jumlah Proyek	Investasi (ribu US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	33	9.615,40	31	10.227,80	
	Kehutanan	-	-	-	13,60	
	Perikanan	-	-	-	-	
	Pertambangan	3	7.405,50	5	9.977,50	
	Subtotal	36	17.020,90	36	20.218,90	
Sekunder	Industri Makanan	56	48.567,00	56	21.949,50	
	Industri Tekstil	1	-	-	-	
	Industri barang dari kulit dan alas kaki	-	-	-	-	
	Industri Kayu	-	-	-	-	
	Industri kertas dan percetakan	-	-	-	37.428,90	
	Industri kimia dan farmasi	8	16.654,70	6	4.076,50	
	Industri Karet dan Plastik	3	244,80	1	70,10	
	Industri Mineral Non Logam	-	-	-	-	
	Industri Logam, mesin dan elek- tronik	-	-	-	-	
	Industri instrumen kedokteran	-	-	-	-	
	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	-	-	-	-	
	Industri Lainnya	-	-	-	-	
	Subtotal	68	65.466,50	63	63.525,00	
	Tersier	Listrik, Gas dan Air	17	5.527,00	12	19.152,60
		Konstruksi	2	3,40	-	-
Perdagangan dan Reparasi		35	359,60	13	657,20	
Hotel dan Restoran		29	97,90	21	1.248,80	
Transportasi, Gudang dan Teleko- munikasi		15	6.215,10	18	11.622,20	
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		25	49,20	35	3.204,30	
Jasa Lainnya		46	885,20	56	1.029,50	
Subtotal		169	13.137,40	155	36.914,60	
Jumlah		223	95.624,80	254	120.658,50	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

2.4 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Sektor pariwisata semakin menunjukkan progres yang bagus pada tahun 2023 ini. Bukan hanya di Sumatera Barat, di Indonesia hal yang sama juga terjadi, jumlah wisatawan yang datang terus meningkat. Adanya peningkatan jumlah wisatawan juga berdampak pada peningkatan di sektor pariwisata lainnya seperti restoran, hiburan, hotel dan penunjang wisata lainnya. Pasca pandemi Covid-19, Bandara Internasional Minangkabau kembali melayani penerbangan untuk rute internasional semenjak Oktober 2022. Selama tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat tercatat sebanyak 56.645 kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 1.266,92 persen. Sebanyak 80,03 persen wisatawan mancanegara merupakan kebangsaan Malaysia.

Tabel 2.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat (kunjungan), 2017-2023

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
(1)	(2)
2017	56.876
2018	54.369
2019	61.131
2020	11.258
2021	-
2022	4.144
2023	56.645

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

<https://sumbar.bps.go.id>

Bab 3

PERKEMBANGAN HARGA-HARGA

Inflasi sepanjang tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat gabungan 2 kota* sebesar **2,47 persen**

◆ atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari **114,72 pada Desember 2022** menjadi **117,55 pada Desember 2023**



Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023
Gabungan 2 Kota*



Catatan *): Kota Padang dan Bukittinggi
Sumber: BPS, Survei Biaya Hidup dan Survei Harga Konsumen

Bab 3 Perkembangan Harga-Harga

Perkembangan harga-harga yang terjadi dapat dilihat dari angka inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa yang mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap.

Dari sisi harga, pemerintah secara rutin mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengontrol tingkat harga yang ada di masyarakat. Kebijakan tersebut diantaranya pengurangan subsidi atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, kenaikan harga air Perusahaan Daerah Air Minum (PAM), dan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan terkait pendapatan untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS), penetapan Upah Minimum Regional, dan sebagainya.

3.1 Perkembangan Inflasi Sumatera Barat 2021-2023

Angka inflasi Sumatera Barat terbentuk dari gabungan 2 kota IHK di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Penghitungan IHK yang merupakan dasar penghitungan inflasi diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) dan Survei Harga Konsumen (SHK). Penghitungan IHK tahun 2021 hingga tahun 2023 menggunakan tahun dasar 2018=100.

Tabel 3.1 Inflasi Umum Menurut Bulan di Provinsi Sumatera Barat (2018=100) (persen), 2021-2023

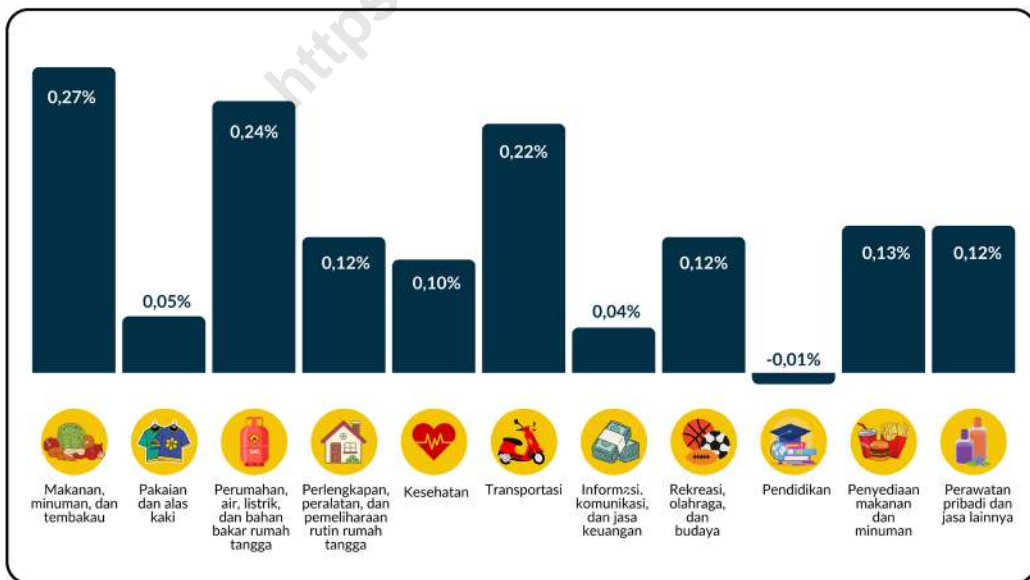
Bulan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	0,12	1,02	0,44
Februari	-0,38	0,07	0,13
Maret	0,31	0,77	-0,09
April	-0,01	0,66	-0,03
Mei	0,19	1,40	0,38
Juni	-0,17	1,18	-0,03
Juli	-0,09	1,22	0,48
Agustus	-0,13	-0,95	0,05
September	0,10	1,39	0,13
Oktober	0,36	-0,22	0,10
November	0,65	-0,27	0,57
Desember	0,42	0,94	0,28
Tahunan	1,40	7,43	2,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Biaya Hidup dan Survei Harga Konsumen

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menargetkan inflasi Indonesia per tahunnya berada pada rentang 3 ± 1 persen. Target ini berhasil dicapai pada tahun 2021 dengan inflasi sebesar 1,40 persen dan tahun 2023 dengan inflasi sebesar 2,47 persen, sedangkan tahun 2022 inflasi Sumatera Barat melebihi target inflasi yang telah ditetapkan dengan angka inflasi secara *year on year* mencapai 7,43 persen.

Selama tahun 2021, inflasi di Sumatera Barat sebesar 1,40 persen. Inflasi terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei, September, Oktober, November, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada November sebesar 0,65 persen dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 0,10 persen. Sementara itu, deflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus. Deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari sebesar 0,38 persen dan deflasi terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,01 persen.

Inflasi Sumatera Barat terjadi karena adanya kenaikan IHK pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran, yakni kelompok kesehatan sebesar 6,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,99 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 1,63 persen; kelompok transportasi sebesar 1,54 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,38 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70 persen. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Biaya Hidup dan Survei Harga Konsumen

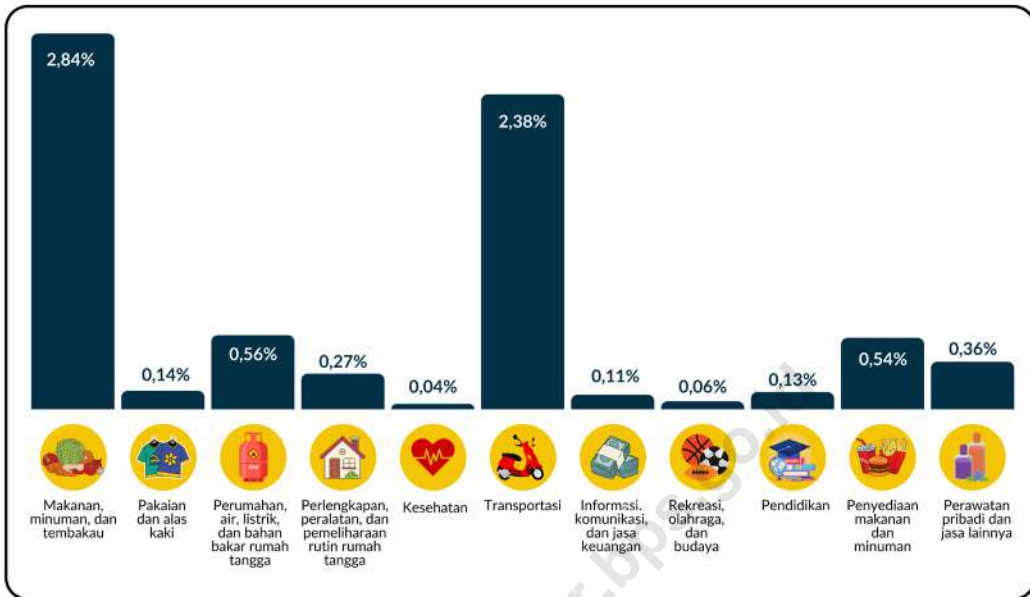
Gambar 3.1 Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota, 2021

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat selama tahun 2021 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok pendidikan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat tahun 2021 adalah minyak goreng, angkutan udara, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, tahu mentah, air kemasan, rekreasi, mangga, rokok putih, dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah, bawang merah, jeruk, telur ayam ras, tomat, sekolah dasar, emas perhiasan, mobil, petai, udang basah, dan beberapa komoditas lainnya.

Tren positif inflasi stabil di tahun 2021 tidak berlanjut di tahun 2022. Inflasi tahun 2022 mencapai 7,43 persen. Inflasi tinggi yang terjadi di tahun 2022 tidak hanya terjadi di Sumatera Barat. Kejadian ini juga terjadi di daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 menuntut para produsen memproduksi barang dan jasa lebih cepat. Kecepatan produksi belum bisa mengimbangi tingginya permintaan. Hal ini lah menjadi salah satu penyebab inflasi tidak terkendali. Inflasi 2022 Gabungan 2 Kota terjadi karena adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,98 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,97 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen.

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi tahun 2022 Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,84 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 2,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,13 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Biaya Hidup dan Survei Harga Konsumen

Gambar 3.2 Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota, 2022

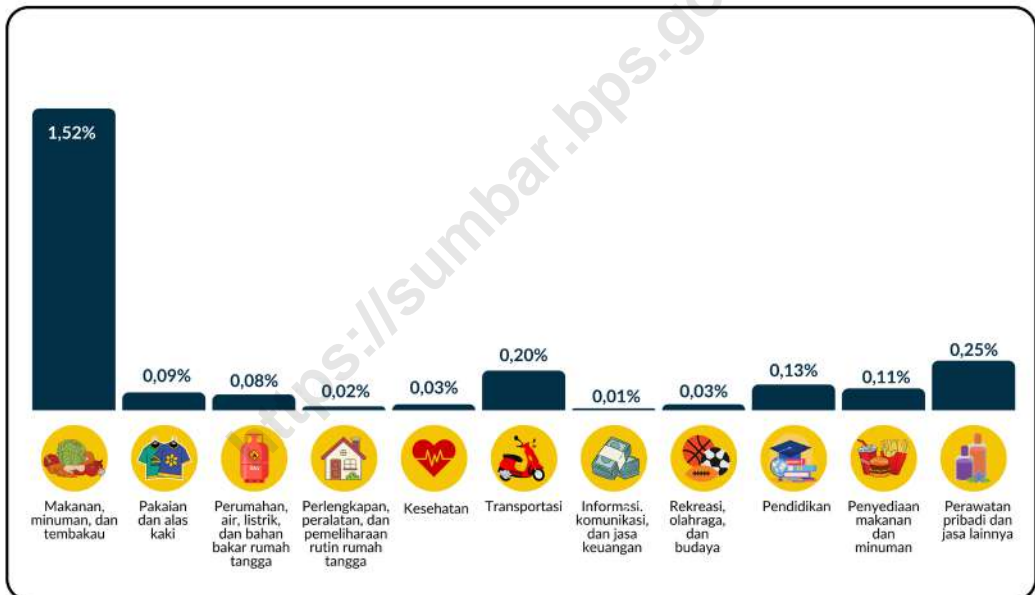
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi tahun 2022 antara lain bensin; beras; angkutan udara; cabai merah; telur ayam ras; rokok kretek filter; mobil; bahan bakar rumah tangga; sabun detergen bubuk/cair; biaya pulsa ponsel; dan beberapa komoditas lainnya. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi tahun 2022 antara lain minyak goreng; ikan cakalang/ikan sisik; laptop/notebook; bawang putih; televisi berwarna; mangga; pir; dan beberapa komoditas lainnya.

Tingginya inflasi tahun 2022 membuat stakeholder terkait lebih hati-hati dalam mengendalikan harga, terutama harga pangan, di tahun 2023. Berbagai kebijakan diluncurkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. Beberapa kesepakatan yang disampaikan dalam *High Level Meeting* Tim Pengendali Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2023 antara lain:

1. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menjaga inflasi komponen *volatile food*, utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional sehingga berada dalam kisaran 3,00 persen–5,00 persen;
3. Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antar daerah;
4. Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;

- Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Inflasi tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan IHK pada 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,93 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,14 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok transportasi sebesar 1,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Biaya Hidup dan Survei Harga Konsumen

Gambar 3.3 Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota, 2023

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Gabungan 2 Kota tahun 2023 di Sumatera Barat adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen; kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Andil komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 antara lain cabai merah sebesar 0,65 persen; rokok kretek filter sebesar 0,27 persen; beras sebesar 0,26 persen; ikan cakalang/ikan sisik sebesar 0,25 persen; bawang merah sebesar 0,20 persen; emas perhiasan sebesar 0,15 persen; mobil sebesar 0,12 persen; kentang dan rokok putih masing-masing sebesar 0,08 persen; angkutan udara sebesar 0,07 persen dan beberapa komoditas lainnya. Sementara itu, andil komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil dominan terhadap deflasi tahun 2023 antara lain daging ayam ras sebesar 0,19 persen; ikan gembolo/ikan aso-aso sebesar 0,12 persen; kangkung sebesar 0,06 persen; bayam sebesar 0,04 persen; telur ayam ras; jengkol; ayam hidup; ikan dencis; dan daging sapi masing-masing sebesar 0,03 persen; jeruk sebesar 0,02 persen; dan beberapa komoditas lainnya.

3.2 Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2021–2023

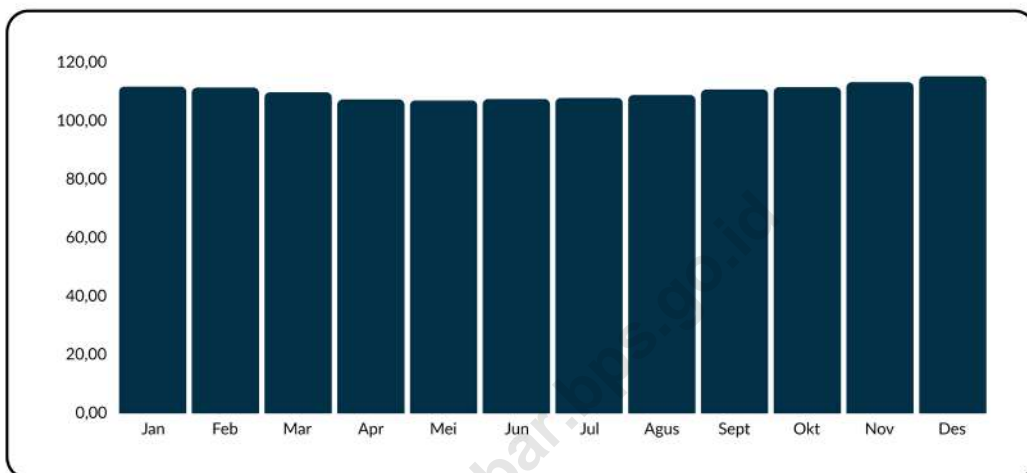
Sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini tercermin dari sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya yang tertinggi dengan nilai persentase selalu di atas 20 persen. Oleh karena itu, membuat sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu proxy indikator yang dapat mengukur tingkat daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Secara konsep, NTP mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi produk pertanian. Dengan kata lain, nilai NTP dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan/penurunan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan/penurunan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Semakin tinggi NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Secara umum NTP menghasilkan 3 (tiga) macam pengertian, yaitu :

1. $NTP > 100$: indeks harga yang diterima oleh petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar oleh petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat dari pada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan;
2. $NTP = 100$: ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani;
3. $NTP < 100$: indeks harga yang diterima oleh petani lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar oleh petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima.

Pada tahun 2023, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat tercatat

sebesar 110,28, turun 0,09 poin dari tahun 2022 yang mencapai 110,37. Rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) tahun 2023 sebesar 130,36 atau naik 3,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 125,43. Sementara itu, rata-rata indeks yang dibayarkan petani (Ib) selama tahun 2023 sebesar 118,20 atau naik 4,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 113,65.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Publikasi Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024

Gambar 3.4 Nilai Tukar Petani Bulanan Sumatera Barat, 2023

Secara umum, NTP bulanan Provinsi Sumatera Barat berfluktuatif selama tahun 2023. NTP melandai di pertengahan tahun dan tinggi di awal serta akhir tahun. NTP tertinggi tercatat pada Desember sebesar 115,36 atau naik 1,80 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,66 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami penurunan sebesar 0,13 persen. Sementara itu, NTP terendah terjadi pada Mei sebesar 107,09 atau turun 0,29 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

Jika dilihat perbandingan NTP antar subsektor maka subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor peternakan memiliki NTP di atas 100 yang mengindikasikan bahwa kehidupan petani yang berusaha di ketiga subsektor ini mempunyai daya beli relatif kuat dibandingkan petani yang bekerja di subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan/budidaya ikan. Hal ini disebabkan karena harga jual komoditas yang diproduksi oleh petani lebih tinggi dibandingkan harga barang-barang yang digunakan untuk ongkos produksi dan konsumsi rumah tangga. Harapannya pendapatan yang didapatkan petani dari pertanian yang diusahakannya bisa mencukupi kebutuhan usaha dan harian petani. Subsektor dengan NTP tertinggi adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 125,97 yang berasal dari rata-rata indeks yang diterima petani sebesar 148,90 dan

rata-rata indeks harga yang dibayar petani sebesar 118,20. Sementara itu, subsektor dengan NTP terendah adalah subsektor perikanan/budidaya ikan, yaitu sebesar 99,06 yang berasal dari rata-rata indeks yang diterima petani sebesar 116,73 dan rata-rata indeks harga yang dibayar petani sebesar 117,83.

Tabel 3.2 Nilai Tukar Petani Sumatera Barat Menurut Subsektor, 2023

Subsektor	It	Ib	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanaman pangan	118,50	118,72	99,82
Hortikultura	124,32	118,12	105,25
Tanaman Perkebunan Rakyat	148,90	118,20	125,97
Peternakan	126,97	115,26	110,16
Perikanan/Budidaya Ikan	116,73	117,83	99,06
Total	130,36	118,20	110,28

Sumber : Badan Pusat Statistik, Publikasi Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024

Bab 4

EKSPOR IMPOR

Pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat mengalami **penurunan kinerja Ekspor dan Impor**



Neraca Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, neraca perdagangan Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami surplus.

Nilai tambah yang dihasilkan dari total barang yang diekspor lebih tinggi dibandingkan barang yang diimpor. Pada tahun 2023 surplus neraca perdagangan mencapai **1.966,29 juta US\$**

Bab 4 Ekspor dan Impor

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual antar negara pada suatu pasar demi mencapai keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak. Perdagangan internasional atau biasa disebut dengan ekspor impor ini bisa memperluas pasar dan menambah keuntungan sektor ekonomi. Pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah cadangan devisa suatu negara.

Indonesia menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, diantaranya kelapa sawit, karet, batu bara, dan lainnya. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang sangat besar ini, komoditas yang dihasilkan bisa berperan penting dalam perdagangan internasional dan berkontribusi besar terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dari sisi impor, Indonesia juga menjadi target pasar potensial bagi negara lain karena banyaknya jumlah penduduk yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia pun membutuhkan beberapa barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh dalam negeri atau membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memproduksi sehingga impor menjadi lebih efektif dan efisien.

4.1 Neraca Perdagangan Indonesia

Neraca perdagangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Selama empat tahun berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus, tetapi pada tahun 2020 nilai ekspor terendah selama tujuh tahun terakhir. Ekspor pada tahun 2020 hanya menyentuh angka US\$163.191,80 juta dengan penyumbang terbesar adalah non migas sebesar 94,94 persen. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada tahun 2020 sebesar US\$141.568,80 juta dengan proporsi dari sektor non migas sebesar 89,93 persen.

Tiga tahun berselang, perdagangan luar negeri Indonesia mulai membaik dengan surplus sebesar US\$36.888,60 juta. Nilai ekspor tahun 2023 mencapai US\$258.774,30 juta, menurun sebesar 11,35 persen dari tahun 2022 (US\$291.904,30 juta) atau 58,57 persen dibandingkan tahun 2020. Dinamisnya nilai ekspor Indonesia juga disebabkan oleh permintaan seiring semakin membaiknya perekonomian global, terutama permintaan dari negara Tiongkok. Sementara itu, impor Indonesia selama 2023 mencapai US\$221.885,70 juta, terdiri dari impor minyak dan gas bumi (migas) sebesar US\$35.830,50 juta dan impor non minyak dan gas bumi (nonmigas) sebesar US\$186.055,30 juta. Jika dibandingkan 2022, nilai impor turun 6,55 persen disebabkan karena menurunnya impor migas dan non migas.

Tabel 4.1 Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia, 2013–2023

Tahun	Ekspor (juta USD)			Impor (juta USD)			Neraca (juta USD)		
	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	182.551,80	32.633,00	149.918,80	186.628,70	45.266,40	141.362,30	-4.076,90	-12.633,40	8.556,50
2014	175.980,00	30.018,80	145.961,20	178.178,80	43.459,90	134.718,90	-2.198,80	-13.441,10	11.242,30
2015	150.366,30	18.574,40	131.791,90	142.694,80	24.613,20	118.081,60	7.671,50	-6.038,80	13.710,30
2016	145.134,00	13.105,50	132.028,50	135.652,80	18.739,80	116.913,00	9.481,20	-5.634,30	15.115,50
2017	168.828,20	15.744,40	153.083,80	156.985,50	24.316,20	132.669,30	11.842,70	-8.571,80	20.414,50
2018	180.012,70	17.171,70	162.841,00	188.711,30	29.868,80	158.842,50	-8.698,60	-12.697,10	3.998,50
2019	167.683,00	11.789,30	155.893,70	171.275,70	21.885,30	149.390,40	-3.592,70	-10.096,00	6.503,30
2020	163.191,80	8.251,10	154.940,70	141.568,80	14.256,80	127.312,00	21.623,00	-6.005,70	27.628,70
2021	231.609,50	12.247,40	219.362,10	196.190,00	25.529,10	170.660,90	35.419,50	-13.281,70	48.701,20
2022*	291.904,30	15.998,20	275.906,10	237.443,00	40.416,40	197.026,60	54.461,30	-24.418,20	78.879,50
2023	258.774,30	15.921,80	242.852,50	221.885,70	35.830,50	186.055,30	36.888,60	-19.908,70	56.797,20

Catatan: *Angka Diperbaiki

Sumber: Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), Dokumen PEB dan PIB serta Non-PEB

4.2 Ekspor Provinsi Sumatera Barat

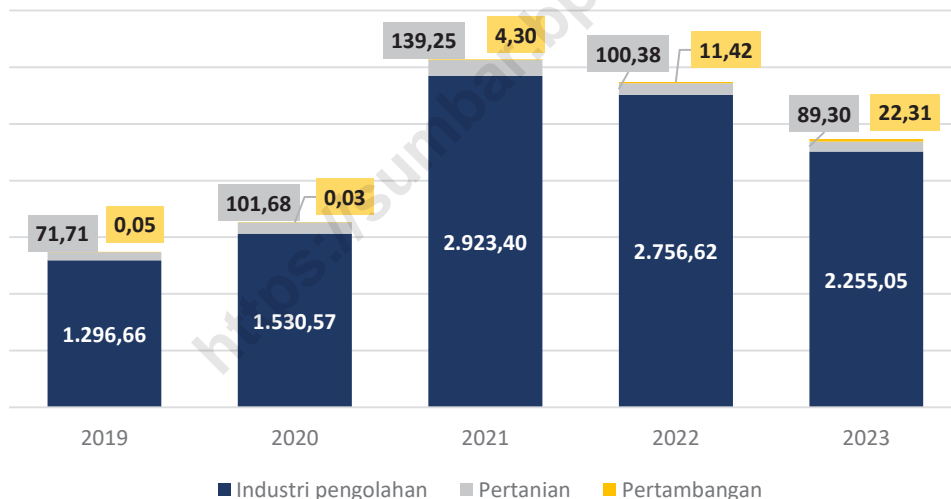
Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan hasil bumi, bahkan menjadi penghasil komoditi unggulan ekspor Indonesia. Pengembangan pasar ekspor merupakan salah satu strategi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan misi ke-4, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Untuk mendukung strategi ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan produk ekspor serta penguatan kerjasama perdagangan regional dan internasional.

Kinerja ekspor Sumatera Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,49 persen dibandingkan tahun 2022, yakni dari US\$2.868,42 juta menjadi US\$2.366,66 juta. Penurunan nilai ekspor ini salah satunya disebabkan karena penerapan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), minyak sawit merah atau *red palm oil* (RPO), *palm oil mill effluent* (POME), serta *refined bleached, deodorized* (RDB) *palm oil* dan *used cooking oil* yang mulai berlaku tanggal 28 April 2022. Pelarangan ekspor ini dikeluarkan untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Sektor industri pengolahan selalu mendominasi ekspor Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir. Nilai ekspor sektor ini berfluktuatif cenderung meningkat. Puncak ekspor sektor industri pengolahan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai US\$2.923,40 juta. Nilai ini mencapai 95,32 persen dari total ekspor Sumatera Barat. Kemudian, meskipun nilai ekspor sedikit menurun pada tahun 2023, sektor industri pengolahan masih mendominasi ekspor

Sumatera Barat yang mencapai 95,28 persen atau US\$2.255,05 juta. Sisanya disumbang oleh sektor pertambangan sebesar 0,94 persen dan sektor pertanian sebesar 3,77 persen dari total ekspor sebesar US\$2.366,66 juta.

Ekspor komoditas yang diklasifikasikan ke dalam sektor industri pengolahan ini sebagian besar diekspor ke negara India (31,14 persen) dan Pakistan (28,05 persen). Selain itu juga diekspor ke negara Bangladesh (10,10 persen); Tiongkok (9,04 persen); dan Amerika Serikat (3,94 persen). Sementara itu, ekspor sektor pertambangan Sumatera Barat yang bernilai sebesar US\$11,42 juta memiliki negara-negara tujuan utama ekspor, yaitu Thailand sebesar 50,90 persen dan Jepang sebesar 30,06 persen. Kemudian untuk sektor pertanian, negara Jepang merupakan negara pengimpor terbesar produk pertanian dari Sumatera Barat yang mencapai 76,65 persen dari total ekspor komoditas sektor pertanian atau sebesar US\$89,30 juta.



Gambar 4.1 Nilai Ekspor menurut Sektor Komoditas Provinsi Sumatera Barat (juta US\$), 2019–2023

Lima negara utama yang menjadi pangsa ekspor Sumatera Barat tahun 2023 adalah India, Pakistan, Bangladesh, Tiongkok, dan Myanmar. Kelima negara ini menjadi negara tujuan ekspor dengan kontribusi sebesar 79,60 persen dari US\$2.366.656,10 ribu total nilai ekspor Sumatera Barat. Jika dirinci lebih lanjut, India sebesar 29,81 persen atau US\$705.547,87 ribu; Pakistan sebesar 26,73 persen atau US\$632.592,85 ribu; Bangladesh sebesar 9,65 persen atau US\$228.353,76 ribu; Tiongkok sebesar 8,63 persen atau US\$204.179,33 ribu; dan Myanmar sebesar 4,78 persen atau US\$113.130,11 ribu.

Tabel 4.2 Volume dan Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan yang Dimuat di Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Negara Tujuan	Volume (ton)		Nilai FOB (ribu US\$)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Asean	260.789,52	275.948,97	219.895,93	166.519,98
Myanmar	108.273,78	133.476,46	124.385,01	113.130,11
Malaysia	52.259,37	49.049,37	62.211,85	32.388,73
Thailand	7.354,14	58.323,82	3.248,30	13.314,31
Vietnam	5.230,78	5.457,96	3.788,72	3.863,42
Kamboja	14.640,00	29.500,40	2.009,14	3.280,74
Singapura	45.256,04	140,94	19.522,26	541,54
Laos	0,39	-	1,68	0,48
Brunei Darussalam	-27.775,02	-0,01	0,10	0,48
Filipina	100.737,24	98.970,73	4.728,87	0,18
Uni Eropa	39.061,76	59.733,80	122.431,42	89.835,11
Belanda	52.494,05	27.268,21	45.943,06	43.723,30
Spanyol	5.798,61	7.499,78	59.674,26	29.356,81
Italia	574,68	524,36	5.331,90	5.517,47
Prancis	604,80	2.318,40	3.169,50	3.452,00
Finlandia	1.058,86	1.008,74	1.037,04	3.203,81
Inggris	114,00	216,00	1.930,37	1.632,37
Swedia	249,76	82,46	590,76	1.100,35
Jerman	525,42	156,36	2.827,05	1.048,00
Belgia	43,00	31,51	1.039,55	300,37
Portugal	212,31	131,11	358,62	263,30
Lainnya	3.640.417,18	4.640.456,79	529,31	237,34
Lainnya	742.929,65	768.375,82	2.526.092,62	2.110.301,00
India	839.108,30	752.783,25	863.711,87	705.547,87
Pakistan	571.378,09	1.484.741,24	876.550,18	632.592,85
Bangladesh	234.993,28	266.512,86	206.877,66	228.353,76
Tiongkok	663.880,33	635.422,48	179.258,75	204.179,33
Jepang	588.127,53	732.621,14	85.371,74	91.450,92
Lainnya	4.001.943,94	5.015.376,49	314.322,42	248.176,27
TOTAL			2.868.419,97	2.366.656,10

Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Ekspor Sumatera Barat ke India, Pakistan, Bangladesh, dan Tiongkok didominasi oleh olahan kelapa sawit beserta turunannya. Negara India mengimpor CPO dari Sumatera Barat yang merupakan bahan baku dalam pembuatan minyak goreng. Ekspor komoditas ini mencapai US\$370.996,53 ribu atau 52,58 persen dari total ekspor Sumatera Barat ke negara ini. Selain itu, ada juga komoditas turunan dari minyak sawit lainnya dan beberapa komoditas lainnya. Berbeda dengan India, ekspor Sumatera Barat ke negara Pakistan didominasi oleh RPO, yaitu minyak sawit mentah yang belum melalui tahap pemurnian. Ekspor komoditas ini mencapai US\$369.745,68 ribu atau sebesar 58,45 persen. Selanjutnya, impor Tiongkok, Bangladesh dan Myanmar didominasi oleh olahan minyak sawit mentah yang telah

dimurnikan, baik berbentuk cair atau pun padat.

Dari kawasan regional ASEAN, nilai ekspor Sumatera Barat ke kawasan Asia Tenggara tahun 2023 sebesar US\$166.519,98 ribu. Nilai ini turun sebesar 0,24 persen dari tahun 2022 yang memiliki nilai sebesar US\$219,895,93 ribu. Pangsa ekspor utama Sumatera Barat di kawasan ini adalah Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Komoditas yang banyak diekspor ke ketiga negara ini adalah produk minyak kelapa sawit beserta turunannya.

4.3 Impor Provinsi Sumatera Barat

Dalam lima tahun terakhir, impor Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Nilai impor pada tahun 2022 mencapai nilai terbesar yaitu sebesar US\$533.346.451 yang didominasi oleh impor bahan baku/penolong. Tetapi setelah itu, impor mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi US\$400.362.971.

Mayoritas komoditas yang diimpor ke Sumatera Barat merupakan bahan baku atau penolong. Pada tahun 2023 saja impor bahan baku/penolong Sumatera Barat mencapai 92,31 persen dari total impor Sumatera Barat, yakni sebesar US\$369.573.865. Selebihnya baru diisi oleh barang modal sebesar 6,27 persen dan barang konsumsi yang sangat sedikit 1,42 persen. Dari kelompok bahan baku/penolong, sebagian impor Sumatera Barat tahun 2023 adalah impor bahan bakar mineral, utamanya diimpor dari Singapura dan Malaysia. Impor bahan bakar mineral dari Singapura mencapai US\$184.761.132 dan impor dari Malaysia sebesar US\$99.200.812. Selain dari kedua negara ini, Sumatera Barat juga mendatangkan bahan bakar mineral dari Oman sebesar US\$1.994.585.

Tabel 4.3 Struktur impor Sumatera Barat menurut Penggunaan Barang (US\$), 2019–2023

Struktur Impor	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bahan Baku/Penolong	428.426.356	177.330.441	401.533.250	515.980.744	369.573.865
Barang Konsumsi	1.573.246	157.394	251.910	1.218	25.122.152
Barang Modal	9.717.102	10.310.912	8.337.029	17.364.489	5.666.954
TOTAL	439.716.704	187.798.747	410.122.189	533.346.451	400.362.971

Sumber: BPS, Dokumen Pemberitahuan Impor Barang

Jalur masuk impor ke Sumatera Barat melalui beberapa titik, seperti pelabuhan Belawan, Dumai, Bandara Internasional Kuala Namu, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Minangkabau, dan Pelabuhan Teluk Bayur. Sebagian besar barang impor ke Sumatera Barat masuk melalui pelabuhan teluk bayur. Pada tahun 2023, sebesar 99,76 persennya masuk melalui pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, yakni sebesar US\$399.401 ribu.

Tabel 4.4 Volume dan Nilai Impor menurut Pelabuhan Bongkar Provinsi Sumatera Barat, 2019–2023

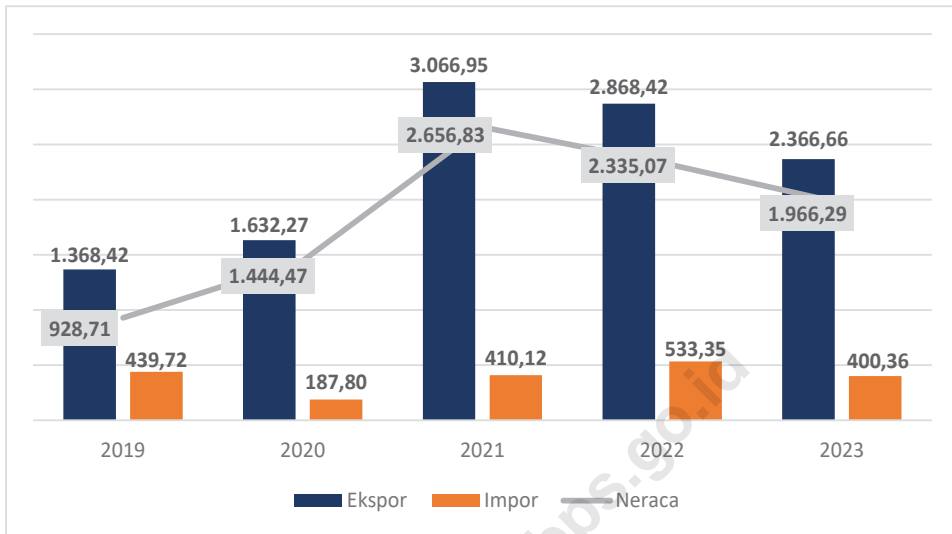
Tahun	Volume (ton)				Nilai (ribu US\$)			
	Teluk bayur	BIM	Lainnya	Jumlah	Teluk bayur	BIM	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2019	1.033.132	95	637	1.033.864	433.654	4.550	1.513	439.717
2020	650.251	-	1.165	651.416	186.387	14	1.398	187.799
2021	787.779	-	38.818	826.597	376.903	-	33.219	410.122
2022	605.642	105	1.273	607.021	527.200	569	5.577	533.346
2023	674.820	4	347	675.171	399.401	175	786	400.363

Sumber: BPS, Dokumen Pemberitahuan Impor Barang

4.4 Neraca Perdagangan Sumatera Barat

Neraca perdagangan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan nilai yang diterima oleh suatu negara di dalam perdagangan. Peningkatan yang ada pada neraca perdagangan, apalagi mengalami surplus, akan berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Mengingat begitu strategisnya peranan perdagangan luar negeri dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Indonesai berusaha untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang berorientasi ekspor dengan mengeluarkan kebijakan pro ekspor. Diharapkan dengan meningkatnya surplus neraca perdagangan akan menaikkan cadangan devisa negara dan memicu laju pertumbuhan ekonomi.

Selama 5 tahun terakhir, neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus. Nilai tambah yang dihasilkan dari total barang yang diekspor lebih tinggi dibandingkan barang yang diimpor. Walaupun neraca perdagangan selalu mengalami surplus, nilainya dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2019, neraca perdagangan Sumatera Barat mengalami surplus sebesar US\$928,71 juta. Surplus perdagangan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 yang menjadi US\$ 1.444,47 juta dan US\$ 2.656,83 juta. Namun, setelah itu surplus perdagangan menurun secara berurutan dari tahun 2022 hingga 2023 menjadi US\$2.335,07 juta dan US\$1.966,29 juta.



Gambar 4.2 Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat (juta US\$), 2019–2023

Bab 5

KEUANGAN DAERAH

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2023

Pendapatan

6.261,81

miliar rupiah

55,32 persen
Pendapatan Transfer

44,45 persen
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

0,23 persen
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah

Belanja

6.353,76

miliar rupiah

69,60 persen
Belanja Operasi

15,59 persen
Belanja Modal

14,81 persen
Belanja Transfer

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat



Bab 5 Keuangan Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Secara menyeluruh tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan mengikuti program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana kegiatan tahunan pemerintah daerah di

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat (000 rupiah), 2022 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.851.966.014,90	2.783.511.043,88
1.1	Pajak Daerah	2.274.498.610,48	2.236.718.044,60
1.2	Retribusi Daerah	12.554.466,26	16.043.240,43
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.650.964,56	117.084.599,94
1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	464.261.973,60	413.665.158,91
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.192.216.355,42	3.463.970.315,44
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.2	Dana Alokasi Umum	3.164.494.555,42	3.436.256.645,44
2.3	Dana Alokasi Khusus	27.721.800,00	27.713.670,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.840.833,04	14.324.977,50
3.1	Pendapatan Hibah	85.840.833,04	14.324.977,50
B	BELANJA DAERAH	6.304.434.742,05	6.353.761.397,97
1	BELANJA OPERASI	4.156.251.043,89	4.422.029.103,28
1.1	Belanja Pegawai	2.078.501.672,89	2.195.331.447,15
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.499.938,82	1.966.520.506,98
1.3	Belanja Hibah	67.416.432,18	260.177.149,15
1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.833.000,00	-
2	BELANJA MODAL	941.069.948,13	990.627.831,07
2.1	Belanja Modal Tanah	7.168.525,85	2.854.444,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.880.410,73	307.153.763,48
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265.824.770,50	318.703.801,33
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	378.135.131,48	323.497.539,24
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.061.109,57	38.418.283,02
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	197.187,37	-
3.1	Belanja Tidak Terduga	197.187,37	-
4	BELANJA TRANSFER	1.206.916.562,66	941.104.463,62
4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kab/Kota dan Desa	1.123.088.172,26	908.031.786,79
4.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota	83.828.390,40	33.072.676,83
	PEMBIAYAAN DAERAH	463.691.231.579,59	269.279.692.879,38
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	483.691.231.579,59	289.279.692.879,38
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	483.691.231.579,59	289.279.692.879,38
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mempunyai tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dalam APBD tersebut tercakup perencanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan ini sangat besar, yang bersumber dari potensi daerah tersebut dan sumber lain. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, kemampuan daerah sangat diperlukan untuk menggali seoptimal mungkin sumber daya yang ada.

5.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah meningkat 2,15 persen. Peningkatan tertinggi terdapat pada komponen pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun jika melihat dari perubahannya, PAD Sumatera Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga 2,40 persen.

Belanja daerah mengalami peningkatan 0,78 persen. Peningkatan tertinggi terdapat pada komponen belanja operasi yang meningkat 6,39 persen. Peningkatan ini bersumber dari belanja pegawai dan belanja hibah.

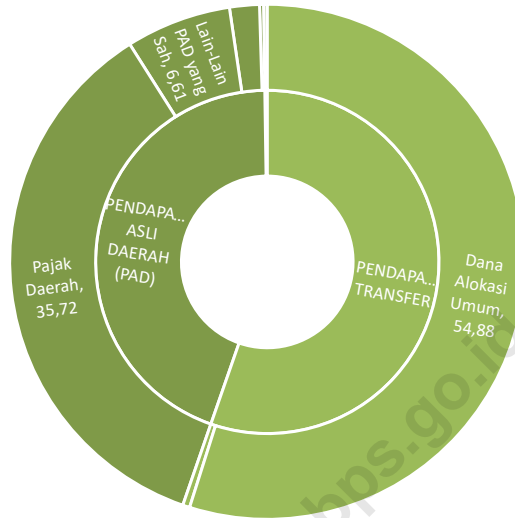
5.2 Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sumber pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terbesar pada tahun 2023 berasal dari pendapatan transfer, dengan nilai yang mencapai 3,46 triliun rupiah atau 55,32 persen dari total realisasi pendapatan. Pada urutan kedua ditempati oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,78 triliun rupiah atau 44,45 persen. Selanjutnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada di urutan ketiga sebesar 14,32 miliar rupiah atau 0,23 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi atas empat (4) bagian, yaitu yang berasal dari (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Kekayaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya atau menurun 2,27 persen.

Pendapatan Transfer merupakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2023 sebesar 3,46 triliun rupiah atau meningkat 8,51 persen dibanding tahun 2022. Berbeda dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di tahun 2023 yang menurun hingga 83,31 persen dibanding tahun 2022

■ PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ■ PENDAPATAN TRANSFER ■ LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

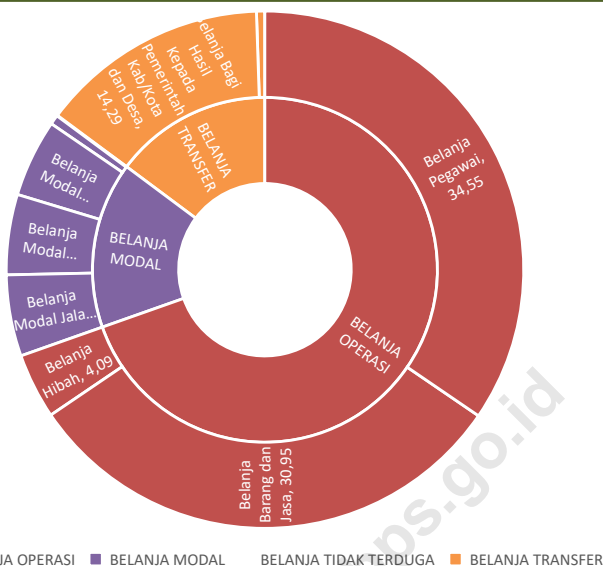
Gambar 5.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2023

5.3 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara garis besar digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk operasional guna penyelenggaraan roda pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.

Laporan realisasi APBD tahun 2023 menyatakan bahwa belanja daerah pemerintah Sumatera Barat adalah sebesar 6,35 triliun rupiah. Belanja daerah dalam APBD terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan *share* terbesar pada belanja pemerintah. Pada tahun 2023 komponen ini mengambil porsi 69,60 persen dari seluruh belanja daerah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah. Belanja pegawai dan belanja barang jasa menjadi sumber terbesar pada pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat pada tahun 2023.

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya. Pada tahun 2023 belanja modal meningkat 5,27 persen dibanding dengan 2022. Belanja modal paling besar di tahun 2023 adalah belanja modal peralatan dan mesin senilai 307,15 miliar rupiah.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Belanja (persen), 2023

5.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Sumatera Barat

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Sumatera Barat, Kota Padang mempunyai realisasi belanja yang terbesar. Pada tahun 2023 realisasi belanja Kota Padang mencapai 2,50 triliun rupiah dengan sumbangan 11,33 persen dibanding seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Selain Kota Padang, sumbangan realisasi belanja terbesar didominasi oleh wilayah administrasi kabupaten. Realisasi belanja daerah untuk daerah dengan wilayah administrasi kota menyumbang realisasi belanja terendah diantara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu 1,64 persen. Nilai ini searah dengan pertumbuhan APBD Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh 1,43 persen. Jika dilihat lebih lanjut rata-rata pertumbuhan dari wilayah yang tumbuh positif yaitu sebesar 4,22 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan dari wilayah yang tumbuh negatif yaitu -2,79 persen.

Pada tahun 2023 terdapat 12 wilayah dengan peningkatan realisasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat tujuh wilayah dengan penurunan realisasi belanja. Peningkatan realisasi belanja tertinggi terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pertumbuhan sebesar 17,20 persen. Peningkatan terendah terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat dengan peningkatan sebesar 0,14 persen. Penurunan terdalam terdapat pada

Kabupaten Padang Pariaman dengan penurunan hingga 6,31 persen.

Jika membandingkan nilai realisasi belanja pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, nilai realisasi belanja pemerintah daerah tingkat II lebih besar dari pada realisasi belanja pemerintah daerah tingkat I. Nilai realisasi belanja daerah pemerintah tingkat II pada tahun 2023 yaitu 22 triliun rupiah, sedangkan nilai realisasi belanja pemerintah provinsi yaitu 6,74 triliun rupiah. Sehingga jika dilihat proporsinya, realisasi belanja pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2023 menyumbang 76,58 persen terhadap APBD di Provinsi Sumatera Barat.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.3 Persentase Proporsi dan Perubahan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat (persen), 2023

Bab 6

PERBANKAN

Jumlah Bank di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
sebanyak **89 bank** dengan **total kantor**
sebanyak **679 kantor bank**

Konvensional

73

Bank

607

Kantor Bank

Jumlah bank dan kantor bank konvensional turun dibandingkan tahun 2022

(83 Bank Konvensional dan 740 Kantor Bank Konvensional)

Syariah

16

Bank

72

Kantor Bank

Jumlah bank syariah meningkat sedangkan jumlah kantor bank syariah turun dibandingkan tahun 2022

(14 Bank Syariah dan 89 Kantor Bank Syariah)

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia



Bab 6 Perbankan

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tahun 2022 kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah (WFO-WFH) sudah dicabut. Hal ini berdampak pada semua lini termasuk sektor perbankan. Merespon dari kebijakan ini, Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter memberlakukan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah menurunkan dan menaikkan suku bunga selama tahun 2022. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di pasca pandemi covid-19.

6.1 Struktur Perbankan

Berdasarkan kegiatan usaha, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang masing-masing dirinci lagi menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank syariah atau bank islam adalah bank yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Alquran, As Sunnah, dan lain-lain). Secara operasional bank syariah dijabarkan sebagai bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan bunga. Kondisi ini tentu membuka peluang untuk berkembangnya bank syariah di Sumatera Barat yang merupakan daerah yang didominasi penduduk beragama Islam.

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula.

Menurut jenisnya bank umum konvensional dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Sementara itu, bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja.

Dari segi kepemilikannya, bank umum terdiri dari bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional dan bank asing/campuran. Jumlah bank pada tahun 2023 di provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 89 bank, sedangkan jumlah kantor bank yaitu berjumlah 679 kantor bank.

Tabel 6.1 Jumlah Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Barat, 2021–2023

Jenis Bank (1)	2021		2022		2023	
	Bank (2)	Kantor Bank (3)	Bank (4)	Kantor Bank (5)	Bank (6)	Kantor Bank (7)
I. Bank Konvensional	83	458	83	740	73	607
1. Bank Umum	1	248	1	540	1	484
1.1 Bank Devisa	1	228	1	525	1	474
1.1.1 Bank Pemerintah	-	98	-	348	-	303
1.1.2 Bank BPD	1	69	1	121	1	120
1.1.3 Bank Swasta Nasional	-	61	-	56	-	51
1.1.4 Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-	-
1.2 Bank Non Devisa	-	20	-	15	-	10
1.2.1 Bank Pemerintah	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Bank BPD	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Bank Swasta Nasional	-	20	-	15	-	10
1.2.4 Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-	-
2. Bank Umum Perkreditan	82	200	82	200	72	123
2.1 BPR	82	200	82	200	72	123
II. Bank Syariah	15	113	14	89	16	72
1. Bank Umum	6	70	5	42	5	40
2. Bank Umum Unit Usaha Syariah	-	12	-	16	-	16
3. Bank Perkreditan Rakyat	9	31	9	31	11	16

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

6.2 Penghitungan Dana Bank

Keadaan perbankan di Sumatera Barat secara total selalu mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2023 tercatat 52,17 triliun rupiah dana masyarakat dihimpun bank, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing. Nilai ini mengalami penurunan 1,21 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan hanya terjadi pada jenis simpanan berupa valuta asing. Pertumbuhan pada jenis simpanan ini mencapai 19,99 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada bank pemerintahan yang mencapai 51,17 persen. Pada jenis simpanan rupiah terjadi penurunan hingga 1,68 persen. Penurunan ini terjadi pada rupiah jenis bank pemerintah yang mencapai 2,72 persen, sedangkan bank swasta nasional meningkat 1,58 persen dari tahun sebelumnya.

Simpanan masyarakat Sumatera Barat di bank dalam bentuk rupiah masih lebih dominan dibanding bentuk valuta asing. Pada tahun 2023 simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah mencapai 50,79 triliun rupiah atau 97,37 persen dari total simpanan. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk rupiah paling banyak terdapat pada bank pemerintah. Pada tahun 2023 bank pemerintah mengumpulkan dana masyarakat sebesar 38,80 triliun rupiah atau 76,39 persen dari total dana masyarakat dalam bentuk rupiah.

Secara total penghimpunan dana masyarakat oleh bank dalam bentuk valuta asing di

tahun 2023 berjumlah 1,37 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 19,99 persen dibanding tahun 2022. Pada tahun 2022 tercatat 1,14 triliun rupiah simpanan masyarakat dalam bentuk valuta asing.

Penghimpunan dana dalam bentuk valuta asing ini dilakukan oleh dua kelompok bank, yaitu bank pemerintah dan bank swasta nasional, sedangkan pada bank asing dan bank campuran serta bank BPR tidak ada pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk valuta asing. Pengumpulan dana berupa valuta asing didominasi oleh bank pemerintah sebanyak 1.021,61 miliar rupiah atau 74,34 persen dari total simpanan valas.

Tabel 6.2 Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Sumatera Barat (juta rupiah), 2021–2023

Simpanan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah	49.046.759	51.660.616	50.792.893
Bank Pemerintah ¹	37.604.547	39.883.180	38.799.599
Bank Swasta Nasional	9.639.118	9.871.047	10.027.407
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1.803.094	1.906.389	1.965.887
Valuta Asing	1.207.476	1.145.302	1.374.191
Bank Pemerintah ¹	856.845	675.807	1.021.607
Bank Swasta Nasional	350.631	469.494	352.584
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	-	-	-
Rupiah Valuta Asing	50.254.235	52.805.917	52.167.084
Bank Pemerintah ¹	38.461.392	40.558.987	39.821.206
Bank Swasta Nasional	9.989.749	10.340.541	10.379.991
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1.803.094	1.906.389	1.965.887

Catatan: ¹ Mencakup Bank BUMD

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

6.3 Posisi Kredit Perbankan

Penggunaan kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan atas tiga jenis, yaitu untuk modal kerja, investasi, dan yang tidak teridentifikasi. Posisi kredit yang telah disalurkan oleh pihak perbankan Sumatera Barat kepada UMKM pada tahun 2023 tercatat sebesar 30,00 triliun rupiah. Kondisi tahun tersebut mengalami peningkatan hingga 9,16 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pinjaman untuk UMKM ini penggunaannya hanya untuk dua jenis, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Sebesar 71,70 persen penggunaan terbesar di tahun 2023 berasal dari kredit yang diberikan bank di Sumatera Barat untuk modal kerja. Sementara untuk investasi tumbuh hingga 13,18 persen.

Posisi kredit untuk UMKM yang diberikan perbankan di Sumatera Barat sebagian besar

disalurkan melalui bank pemerintah. Pada tahun 2023 sebanyak 26,40 triliun rupiah kredit dikucurkan untuk UMKM atau sekitar 87,99 persen dari total kredit UMKM. Sebagian besar kredit dari bank pemerintah itu digunakan untuk modal kerja yang mencapai 19,22 triliun rupiah, sisanya adalah untuk investasi sebesar 7,18 triliun rupiah.

Bank swasta nasional di Sumatera Barat memberikan kredit kepada UMKM dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding bank pemerintah. Posisi kredit bank swasta nasional kepada UMKM di tahun 2023 mencapai 3,60 triliun rupiah atau 12,00 persen dari total kredit UMKM. Nilai ini meningkat 10,35 persen dari tahun sebelumnya. Pada jenis bank ini, terjadi peningkatan kredit modal kerja dan investasi dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,70 persen dan 8,04 persen.

Sama halnya dengan penyaluran kredit oleh bank pemerintah, pada bank swasta nasional penggunaan kredit UMKM terbanyak juga untuk modal kerja. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,29 triliun rupiah kredit UMKM untuk modal kerja dikucurkan bank swasta nasional, sedangkan untuk investasi hanya sebesar 1,31 triliun rupiah.

Tabel 6.3 Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat (juta rupiah), 2021-2023

Kredit	2021	2022	2023 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Bank Pemerintah	20.948.977	24.220.111	26.400.309
1. Modal Kerja	16.837.926	18.617.781	19.217.724
2. Investasi	4.111.051	5.602.330	7.182.585
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
II. Bank Swasta Nasional	2.741.403	3.263.306	3.600.908
1. Modal Kerja	1.685.819	2.053.269	2.293.570
2. Investasi	1.055.584	1.210.038	1.307.338
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
III. Bank Asing dan Bank Campuran	3.835	1.373	1.285
1. Modal Kerja	287	-	-
2. Investasi	3.548	1.373	1.285
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
Jumlah I+II+III	23.694.214	27.484.790	30.002.503
1. Modal Kerja	18.524.032	20.671.050	21.511.294
2. Investasi	5.170.183	6.813.741	8.491.208
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-

Catatan: ¹Kondisi Desember 2023

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Bank asing dan bank campuran menyalurkan kredit perbankan kepada usaha kecil, mikro dan menengah dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibanding kelompok bank pemerintah dan bank swasta nasional. Pada tahun 2023 bank asing dan bank campuran telah menyalurkan kredit sebesar 1,29 miliar rupiah. Nilai ini menurun hingga 6,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kredit tersebut pada tahun 2023 hanya untuk investasi sebesar 1,29 miliar rupiah.

Tabel 6.4 Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Sumatera Barat (juta rupiah), 2022–2023

Pinjaman (1)	Rupiah dan Valas		Rupiah	
	2022 (2)	2023 ¹ (3)	2022 (4)	2023 ¹ (5)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.292.043	3.861.811	3.292.043	3.861.811
Pertambangan dan Penggalian	173.308	167.226	173.308	167.226
Industri Pengolahan	3.545.550	4.327.645	2.946.840	3.578.598
Pengadaan Listrik dan Gas	222.297	235.376	222.297	235.376
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.845	45.008	56.845	45.008
Konstruksi	669.951	669.616	669.951	669.616
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	17.749.755	18.240.731	17.681.256	18.160.986
Transportasi dan Pergudangan	762.748	1.015.077	762.748	1.015.077
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.352.291	1.567.620	1.352.291	1.567.620
Informasi dan Komunikasi	37.601	715.438	37.601	37.790
Jasa Keuangan dan Asuransi	81.058	77.629	81.058	77.629
Real Estate	107.727	186.932	107.727	186.932
Jasa Perusahaan	500.777	629.575	500.777	629.575
Asministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.451	3.115	5.451	3.115
Jasa Pendidikan	201.544	245.634	201.544	245.634
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	205.097	217.859	205.097	217.859
Jasa Lainnya	9.514.472	11.077.621	9.432.548	10.780.223
Pinjaman Kepada Lapangan Usaha	38.478.515	43.283.913	37.729.381	41.480.255
Rumah Tinggal	4.398.533	4.776.366	4.398.533	4.776.366
Flat dan Apartemen	70.283	98.277	70.283	98.277
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	114.159	114.324	114.159	114.324
Kendaraan Bermotor	1.281.936	1.328.960	1.281.936	1.328.960
Lainnya	25.269.608	26.682.003	25.254.181	26.666.744
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	31.134.520	32.999.930	31.119.093	32.984.672

Catatan: ¹Kondisi Desember 2023

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Kredit rupiah dan valas yang tersalurkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik pada lapangan usaha maupun bukan lapangan usaha. Secara total, kredit yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 9,58 persen. Kredit menurut lapangan usaha meningkat sebesar 12,49 persen dengan peningkatan tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 1.802,71 persen. Pada pinjaman bukan lapangan usaha terjadi peningkatan sebesar 5,99 persen dengan peningkatan yang tertinggi pada flat dan apartemen hingga 39,83 persen.

Porsi posisi kredit terbesar adalah pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dengan porsi sebesar 23,91 persen dengan pertumbuhan 2,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan kredit terjadi pada lima sektor, semuanya berdasarkan lapangan usaha. Pinjaman kepada bukan lapangan usaha yang diberikan pihak bank mengalami peninggkatan. Pinjaman untuk rumah tinggal meningkat 8,59 persen, flat dan apartemen meningkat 39,83 persen, Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) meningkat 0,14 persen, kendaraan bermotor meningkat 3,67 persen, dan lainnya meningkat 5,59 persen.

Jika melihat kredit rupiah (tanpa valas), kredit yang tersalurkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik pada lapangan usaha maupun bukan lapangan usaha. Secara total, kredit yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 8,16 persen. Kredit menurut lapangan usaha meningkat sebesar 9,94 persen dengan peningkatan tertinggi pada lapangan usaha real estate hingga 73,52 persen. Berdasarkan tabel dapat diketahui hanya terdapat empat sektor yang menggunakan pinjaman yang berasal dari valas. Sektor tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, informasi dan Komunikasi dan jasa lainnya. Pada pinjaman bukan lapangan usaha tidak terdapat kredit yang berasal dari valuta asing, sehingga nilainya sama dengan kolom rupiah dan valas.

Bab 7

PENDUDUK

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebanyak **5.757,21 ribu jiwa** dengan **Laju Pertumbuhan Penduduk** sebesar **1,45 persen**.

! dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus meningkat tiap tahunnya, namun laju pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami perlambatan

Menurut Jenis Kelamin



Menurut Kelompok Umur



Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024



Bab 7 Penduduk

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, data kependudukan beserta karakteristiknya memiliki peran penting khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemahaman tentang komposisi dan distribusi penduduk, memungkinkan perencanaan pembangunan mengenai pengembangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, data kependudukan bukan hanya sekedar statistik, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penduduk memegang peran penting dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan data yang akurat mengenai jumlah penduduk. Data ini diperoleh melalui sensus, survei, dan pencatatan administrasi kependudukan. Jumlah penduduk di suatu wilayah senantiasa berubah seiring waktu, yang dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), serta migrasi. Perubahan ini dikenal sebagai dinamika penduduk. Salah satu elemen kunci dari dinamika penduduk adalah pertumbuhan penduduk, yaitu perubahan dalam jumlah penduduk suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah penduduk di suatu daerah.

Jumlah penduduk suatu negara terutama negara berkembang seperti Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Terdapat pandangan negatif dan positif terkait pertumbuhan jumlah penduduk. Berdasarkan pandangan negatif, jumlah penduduk yang terus bertambah akan menjadi penghambat dalam pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali dan tidak disertai lapangan pekerjaan yang mencukupi berpotensi untuk meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang kemudian akan mengarah pada peningkatan permasalahan seperti tingginya kriminalitas, kualitas hidup rendah, dan masalah sosial lainnya. Jika dilihat dari sudut pandang positif, bertambahnya jumlah penduduk justru dapat memacu kegiatan ekonomi karena tersedianya tenaga kerja yang lebih banyak sehingga jumlah produksi barang meningkat dan permintaan barang dan jasa juga meningkat. Hal ini dapat memajukan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, tidak semua penduduk dapat menjadi pemacu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan *skill* yang tinggi agar dapat mencapai hal tersebut.

Data pada tabel 7.1 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, laju pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. LPP dihitung berdasarkan penduduk tahun tertentu dibandingkan penduduk hasil Sensus Penduduk. Untuk LPP tahun 2018–2019

membandingkan dengan hasil SP2010, dan LPP 2021–2023 dibandingkan dengan hasil SP2020. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) tercatat jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,53 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,29 persen. Dilihat dari data penduduk dari tahun 2018-2023 pada tabel 17, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 tercatat sebanyak 5,38 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,30 persen. Selanjutnya, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 5,44 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,25 persen. Pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya menjadi 5,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan yaitu 1,52 persen. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk terus memiliki pola yang sama setiap tahunnya sampai 2021. Jumlah penduduk terus meningkat tiap tahunnya, namun jika dilihat laju pertumbuhan penduduknya, data menunjukkan LPP di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan mencapai 1,45 persen pada tahun 2023.

Perubahan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dasar seperti kelahiran dan kematian, tetapi juga oleh dinamika migrasi, baik migrasi masuk maupun keluar dari provinsi tersebut. Migrasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di wilayah Sumatera Barat. Salah satu bentuk migrasi yang paling menonjol adalah tradisi merantau, yang telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Minangkabau. Joel S. Khan, dalam bukunya yang berjudul *Merantau: The Minangkabau Experience* (Joel S. Khan, 1993), menjelaskan bahwa merantau adalah tradisi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Merantau bukan hanya sekadar perpindahan fisik, melainkan juga proses sosial yang menyatu dengan struktur budaya mereka. Biasanya, merantau dilakukan oleh laki-laki Minangkabau yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari peluang hidup yang lebih baik di luar daerah asal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tradisi merantau ini tidak hanya berpengaruh pada aspek demografis, tetapi juga mencerminkan sifat dinamis dari masyarakat Minangkabau dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Fenomena ini menjelaskan mengapa migrasi, sebagai salah satu komponen utama dinamika penduduk, memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
(1)	(2)	(3)
2018	5.382,08	1,30
2019	5.441,20	1,25
2020	5.534,47	1,29
2021	5.597,31	1,52
2022	5.677,55	1,47
2023	5.757,21	1,45

Catatan: Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk hasil Sensus Penduduk dibandingkan dengan penduduk tengah tahun (Juni)
 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

7.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Ditinjau menurut jenis kelamin, data menunjukkan bahwa sebelum tahun 2020 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Pola berbeda terjadi sejak tahun 2020 dimana penduduk laki-laki di Provinsi Sumatera Barat tercatat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2023, tercatat jumlah laki-laki sebanyak 2,90 juta jiwa atau sebesar 50,38 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Barat dan jumlah perempuan tercatat sebanyak 2,86 juta jiwa atau 49,62 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Barat. Adapun rasio antara penduduk laki-laki dengan perempuan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar 101,52. Artinya, terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, tabel 7.2 menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia 15–64 tahun (usia produktif), yakni sebanyak 3,91 juta jiwa atau 67,93 persen dari total populasi penduduk. Hal ini berarti, sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam usia produktif sehingga pemerintah perlu berfokus pada peningkatan kualitas dan kebutuhan pendidikan, serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk usia produktif. Adapun, rasio penduduk usia produktif laki-laki (68,46 persen) lebih besar lebih banyak dibandingkan rasio penduduk produktif perempuan (67,40 persen).

Selanjutnya, penduduk yang termasuk kelompok umur 0–14 tahun sebanyak 1,42 juta jiwa atau 24,74 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Pada kelompok umur ini, jumlah penduduk laki-laki juga lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan selisih 33,89 ribu jiwa. Kemudian, Kelompok umur 65 tahun keatas memiliki jumlah penduduk terkecil dari keseluruhan total penduduk Sumatera Barat, yakni sebesar 421,81 ribu jiwa atau 7,33 persen. Pada kelompok umur 65 tahun ke atas ditemukan kondisi yang berbeda dibanding dua kelompok umur lainnya dimana jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Secara umum, laki-laki memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) yang lebih rendah dibandingkan perempuan karena beberapa faktor seperti perilaku kesehatan, akses ke layanan kesehatan, dan faktor genetik.

Tabel 7.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah (ribu jiwa)	Persen (%)	Jumlah (ribu jiwa)	Persen (%)	Jumlah (ribu jiwa)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0–14	729,08	25,14	695,19	24,33	1.424,27	24,74
15–64	1.985,49	68,46	1.925,68	67,40	3.911,17	67,93
65+	185,73	6,40	236,08	8,26	421,81	7,33
Jumlah	2.900,27	100,00	2.856,94	100,00	5.757,21	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

7.2 Pendidikan

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 7.3, dapat dilihat bahwa kondisi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat masih belum mencapai tingkat yang memadai atau ideal. Hal ini tercermin dari tingginya persentase penduduk yang belum memiliki ijazah pendidikan formal, atau yang hanya memiliki ijazah setingkat SMP atau sederajat. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA atau sederajat dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi.

Keadaan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di provinsi tersebut, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, data menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, situasi ini masih berlanjut tanpa perubahan yang signifikan. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan, sehingga lebih banyak penduduk yang dapat memperoleh ijazah pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Tabel 7.3 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2021–2023

Kelompok Pendidikan	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Punya	14,60	16,44	15,53	12,49	14,38	13,44	12,13	13,53	12,84
SD/MI	20,83	18,07	19,43	21,12	18,28	19,69	20,46	18,38	19,41
SMTMP	22,26	19,86	21,05	23,04	19,54	21,28	23,41	20,12	21,74
SMTA	32,37	30,34	31,34	33,30	31,87	32,58	33,84	32,31	33,07
Perguruan Tinggi	9,94	15,30	12,65	10,06	15,94	13,02	10,16	15,65	12,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Kondisi pendidikan yang tidak merata ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta faktor ekonomi yang membuat sebagian penduduk tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua hal ini memperkuat kenyataan bahwa Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2023, sebagian besar penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Barat hanya memiliki ijazah tertinggi SMA/Sederajat dengan persentase sebesar 33,07 persen. Selanjutnya, persentase penduduk yang memiliki ijazah SMP/Sederajat berada pada urutan kedua tertinggi, yakni sebesar 21,74 persen. Pada urutan ketiga, penduduk dengan ijazah pendidikan SD/MI sebesar 19,41 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak memiliki ijazah pendidikan sebesar 12,84 persen, serta penduduk yang memiliki ijazah Perguruan

Tinggi sebesar 12,94 persen. Pola tersebut cenderung tidak berubah dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, dimana penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penduduk dengan ijazah tertinggi yang dimiliki adalah SMA/Sederajat.

Ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini, baik secara global maupun nasional. Ketidaksetaraan gender pada aspek pendidikan masih banyak dijumpai dimana jumlah perempuan yang bersekolah tidak lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun, hal ini tidak berlaku di Provinsi Sumatera Barat dimana tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan yang signifikan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Penduduk perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu, bahkan melebihi penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi (DI/II/III dan DIV/S1/S2/S3/Profesi) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase penduduk perempuan yang memiliki ijazah Perguruan Tinggi sebesar 15,65 persen dibanding penduduk laki-laki dengan persentase 10,16 persen.

7.3 Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), melalui Sakernas dapat diperoleh data penduduk usia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama. Secara umum, penduduk usia 15 tahun keatas terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu tergolong angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mencari kerja. Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan dan kegiatan utamanya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berdasarkan Tabel 7.4 dan 7.5 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2021 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 tercatat sebanyak 4,34 juta penduduk. Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah sebanyak 3,02 juta penduduk atau 69,61 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas, lebih banyak 1,70 juta jiwa dibanding penduduk bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023, yakni dari 2,76 juta menjadi 3,02 juta penduduk,

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan perbedaan jumlah penduduk yang cukup banyak, pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja tercatat sebanyak 1,79 juta penduduk atau 82,21 persen dari total penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas. Jumlah penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 1,23 juta penduduk atau 56,94 persen dari total penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja mengalami kenaikan 4,95 persen.

Tabel 7.4 Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2021–2023

Kegiatan Utama	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angkatan Kerja	80,67	55,04	67,72	82,58	56,28	69,30	82,21	56,94	69,61
Bekerja	75,67	51,20	63,31	77,46	52,68	64,95	77,85	53,05	65,48
Pengangguran	5,00	3,84	4,41	5,12	3,59	4,35	4,36	3,90	4,13
Bukan Angkatan Kerja	19,33	44,96	32,28	17,42	43,72	30,70	17,79	43,06	30,39
Sekolah	8,61	10,30	9,46	8,74	9,99	9,37	7,53	9,10	8,31
Mengurus RT	3,97	31,21	17,73	3,63	31,10	17,51	3,70	30,89	17,27
Lainnya	6,75	3,45	5,08	5,04	2,64	3,83	6,56	3,07	4,82

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Angkatan Kerja Nasional

Apabila dirinci lebih lanjut, angkatan kerja terbagi menjadi penduduk bekerja dan pengangguran, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2,84 juta penduduk atau 65,48 persen dari total penduduk usia 15 tahun keatas, Selanjutnya, penduduk yang menganggur pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4,13 persen dari total penduduk usia 15 tahun keatas, dan jumlah penduduk menganggur jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 5,94, menurun 0,34 persen poin dibandingkan TPT 2022 yang sebesar 6,28. Sejak Tahun 2021 sampai 2023, persentase penduduk yang menganggur terus mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19 telah tepat sasaran sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang menganggur.

Selanjutnya, pada tahun 2023 penduduk yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja mengalami penurunan persentase dibanding tahun sebelumnya dari 30,70 persen menjadi 30,39 persen. Menurut jenis kelamin, kelompok bukan angkatan kerja di dominasi oleh penduduk perempuan. Peristiwa dominasi perempuan pada kelompok bukan angkatan kerja berbanding terbalik dengan kelompok angkatan kerja yang lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 933,31 ribu penduduk perempuan tergolong bukan angkatan kerja atau 43,06 persen dari total penduduk perempuan usia 15 tahun keatas. Sebagian besar kegiatan utama penduduk perempuan adalah mengurus rumah tangga. Tercatat sekitar 670 ribu penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga atau 30,89 persen dari total penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja. Kemudian, penduduk perempuan yang bersekolah sebanyak 197,18 ribu penduduk dan melakukan kegiatan lainnya sekitar 67 ribu penduduk perempuan. Sebanyak 387,25 ribu penduduk laki-laki yang tergolong bukan angkatan kerja pada tahun 2023, sebagian besarnya masih bersekolah untuk kegiatan utamanya, yakni mencapai 164 ribu penduduk atau 7,53 persen

dari total penduduk usia 15 tahun keatas, diikuti dengan kegiatan lainnya sebanyak 142,73 ribu penduduk dan mengurus rumah tangga sebanyak 80,63 ribu penduduk.

Tabel 7.5 Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin (jiwa), 2021–2023

Kegiatan Utama	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angkatan Kerja	1.627.523	1.133.869	2.761.392	1.692.039	1.176.231	2.868.270	1.790.032	1.234.398	3.024.430
Bekerja	1.526.586	1.054.858	2.581.444	1.587.057	1.101.107	2.688.164	1.695.012	1.149.913	2.844.925
Pengangguran	100.937	79.011	179.948	104.982	75.124	180.106	95.020	84.485	179.505
Bukan Angkatan Kerja	390.022	926.214	1.316.236	356.808	913.871	1.270.679	387.247	933.310	1.320.557
Sekolah	173.694	212.221	385.915	179.043	208.730	387.773	163.896	197.183	361.079
Mengurus RT	80.171	642.901	723.072	74.472	650.057	724.529	80.626	669.639	750.265
Lainnya	136.157	71.092	207.249	103.293	55.084	158.377	142.725	66.488	209.213
Jumlah	2.017.545	2.060.083	4.077.628	2.048.847	2.090.102	4.138.949	2.177.279	2.167.708	4.344.987

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Angkatan Kerja Nasional

7.4 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2023, diperoleh jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 2,84 juta penduduk. Telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 156,16 ribu penduduk dibandingkan tahun 2022. Menurut lapangan usaha, sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat bekerja di lapangan pekerjaan utama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase 33,90 persen dari total penduduk yang bekerja atau sebanyak 964,49 ribu penduduk. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini dikarenakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan pekerjaan utama di Provinsi Sumatera Barat dengan faktor utama sumber daya alam di bidang pertanian yang sangat memadai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan ini mengalami peningkatan sebanyak 24,75 ribu penduduk.

Selanjutnya, lapangan pekerjaan utama kedua terbesar yang menyerap tenaga kerja adalah lapangan pekerjaan utama Perdagangan Besar dan Eceran. Pada Tahun 2023, tercatat sebanyak 529,29 ribu penduduk bekerja di lapangan pekerjaan utama ini atau 18,60 persen dari total penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat. Tenaga kerja pada lapangan kerja utama ini mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 14,05 ribu penduduk jika dibandingkan dengan tahun 2022. Banyaknya tenaga kerja di lapangan pekerjaan ini salah satunya disebabkan oleh budaya dagang di kalangan masyarakat Sumatera Barat.

Lapangan pekerjaan utama ketiga yang menyerap banyak tenaga kerja adalah industri pengolahan. Pada tahun 2023, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 245,57 ribu penduduk atau 8,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun, tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mengalami sedikit kenaikan sebanyak 14,79 ribu penduduk jika dibandingkan tahun 2022.

Tabel 7.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 dan 2023

Lapangan Usaha	2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	939.746	34,96	964.493	33,90
2. Pertambangan dan Penggalian	38.347	1,43	35.487	1,25
3. Industri Pengolahan	230.775	8,58	245.568	8,63
4,5. Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang	12.579	0,47	13.031	0,46
6. Konstruksi	117.992	4,39	130.223	4,58
7. Perdagangan Besar dan Eceran	543.335	20,21	529.285	18,60
8. Transportasi dan Pergudangan	89.098	3,31	110.681	3,89
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	212.594	7,91	237.846	8,36
10. Informasi dan Komunikasi	18.413	0,68	24.953	0,88
11,12. Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat	24.723	0,92	25.651	0,90
13. Jasa Perusahaan	32.739	1,22	44.776	1,57
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	122.595	4,56	140.148	4,93
15. Jasa Pendidikan	169.700	6,31	187.278	6,58
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55.036	2,05	55.009	1,93
17. Jasa Lainnya	80.492	2,99	100.496	3,53
Jumlah	2.688.164	100,00	2.844.925	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Angkatan Kerja Nasional

7.5 Penduduk Menurut Tingkat Pengeluaran

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah adalah dengan melihat pola konsumsi masyarakatnya. Pola konsumsi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut, karena pola pengeluaran masyarakat berhubungan erat dengan pendapatan dan standar hidup mereka. Dengan menganalisis pola konsumsi, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat membelanjakan pendapatannya, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya.

Pola konsumsi masyarakat secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi non-makanan. Pengeluaran untuk makanan mencakup kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, daging, dan bahan makanan lainnya, sementara pengeluaran non-makanan mencakup kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pakaian, dan rekreasi. Kedua jenis pengeluaran ini memberikan informasi yang penting tentang kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah biasanya dianggap lebih baik apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang lebih sejahtera cenderung memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka memiliki sisa penghasilan untuk membelanjakan kebutuhan non-makanan yang biasanya terkait dengan kualitas hidup yang lebih baik, seperti kesehatan, pendidikan,

dan aktivitas rekreasi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah biasanya akan mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan, karena penghasilan yang terbatas. Oleh karena itu, proporsi pengeluaran antara kebutuhan makanan dan non-makanan dapat menjadi alat ukur yang penting untuk mengevaluasi kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah.

Dari tahun 2021 sampai 2023, pengeluaran rata-rata perkapita masyarakat Provinsi Sumatera Barat secara konsisten mengalami peningkatan pada seluruh jenis pengeluaran. Pada tahun 2023, pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Provinsi Sumatera Barat mencapai 1,41 juta rupiah yang mana mengalami kenaikan 5,13 persen dibandingkan tahun 2022.

Menurut jenisnya, pengeluaran masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk makanan pada tahun 2023 mencapai 52,94 persen dari total pengeluaran rata-rata perkapita atau sebesar 747.469 rupiah. Jumlah ini mengalami kenaikan 4,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk non makanan pada tahun 2023 mencapai 664.354 rupiah. Jumlah ini meningkat 6,00 persen dibanding tahun 2022.

Tabel 7.7 Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat (rupiah), 2021-2023

Jenis Pengeluaran	2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	668.029	52,12	716.262	53,33	747.469	52,94
Non Makanan	613.629	47,88	626.724	46,67	664.354	47,06
Jumlah	1.281.658	100,00	1.342.986	100,00	1.411.823	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak ada artinya apabila peningkatan pendapatan tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat itu berarti, maka diperlukan pemerataan pembagian pendapatan di masyarakat.

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan dapat dilakukan dengan dua indikator yaitu menggunakan kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (*Gini Ratio*). Menurut kriteria Bank Dunia (World Bank), penduduk dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketidakmerataan pendapatan dapat diketahui dengan melihat seberapa besar persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Apabila pendapatan yang diterima oleh kelompok ini kurang dari 12 persen dari total pendapatan, maka ketimpangan distribusi pendapatan dianggap tinggi. Sebaliknya, jika kelompok ini menerima pendapatan antara 12 sampai 17 persen dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatannya tergolong sedang, Sementara itu, apabila pendapatan kelompok ini lebih dari 17 persen maka dianggap memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah.

Selain kriteria Bank Dunia, Indeks Gini (*Gini Ratio*) juga dapat melihat ketimpangan

pendapatan penduduk di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai 1, apabila Gini Ratio kurang dari 0,30 maka ketimpangan pendapatannya dikatakan rendah. Namun, apabila bernilai antara 0,30 sampai 0,50 maka ketimpangannya tergolong sedang dan jika lebih dari 0,50 maka ketimpangan pendapatannya tinggi.

Data yang biasanya digunakan untuk menghitung Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia adalah data pengeluaran penduduk karena data ini dianggap lebih akurat dan lebih mencerminkan konsumsi masyarakat dibanding data pendapatan.

Dari tahun 2011 sampai 2023, persentase distribusi pengeluaran untuk kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah selalu di atas 20 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Sumatera Barat tergolong rendah. Menurut kelompoknya, persentase distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2023. Sementara itu, kelompok 40% penduduk berpendapatan sedang cenderung lebih stabil di angka 37% dan 20% penduduk berpendapatan tinggi cenderung berfluktuasi pada periode tahun 2018 sampai 2023.

Nilai Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai 2023 selalu berada disekitar angka 0,28 sampai 0,35 yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kriteria sedang. Selama 13 tahun terakhir, nilai Ratio Gini Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan dengan nilai indeks gini tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 0,35 persen. Rasio Gini terus turun hingga tahun 2023 bernilai 0,28 atau turun sebesar 0,07 poin. Terlihat bahwa pemerintah telah cukup berhasil dan perlu mencari terobosan baru agar *growth for equity* terus terjadi.

Tabel 7.8 Distribusi Pengeluaran dan Rasio Gini Penduduk di Provinsi Sumatera Barat, 2011-2023

Tahun	Distribusi Pengeluaran			Gini Ratio (%)
	40% rendah	40% sedang	20% tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	26,15	40,08	33,77	0,353
2012	24,91	40,15	34,95	0,364
2013	25,07	37,65	37,28	0,363
2014	21,31	37,23	41,46	0,334
2015	20,50	36,18	43,33	0,342
2016	20,82	36,86	42,32	0,331
2017	21,31	37,59	41,1	0,318
2018	21,06	37,78	41,17	0,321
2019	21,79	38,28	39,93	0,306
2020	21,99	37,96	40,05	0,305
2021	22,19	37,43	40,38	0,306
2022	22,79	36,88	40,33	0,300
2023	23,73	37,68	38,59	0,280

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Indikator untuk mengukur kemiskinan adalah *Head Count Index* (HCI-P0) yang merupakan kemiskinan absolut.

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum penduduk untuk mencukupi kebutuhannya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Daerah perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan terkait faktor ekonomi, sosial, dan geografisnya seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi masyarakat maupun ketersediaan barang dan jasa. Hal ini membuat garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan memiliki standar yang berbeda dalam mengukur tingkat kemiskinan penduduk.

Tingkat pendapatan yang beragam akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, sedangkan pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan jasa. Akibat dari perbedaan-perbedaan ini, maka garis kemiskinan juga dibedakan menjadi garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan perdesaan. Garis kemiskinan merupakan batas penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin dan tidak miskin.

Tabel 7.9 Garis Kemiskinan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan), 2013-2023

Tahun	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	Perkotaan-Perdesaan (K+D)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	332.837	288.215	305.502
2014	374.968	333.511	349.656
2015	406.335	369.753	384.277
2016	441.523	413.790	425.141
2017	472.614	439.220	453.612
2018	496.142	460.249	476.554
2019	526.008	483.939	503.652
2020	562.567	527.830	544.315
2021	580.937	556.181	568.703
2022	622.579	598.431	610.941
2023	682.515	652.709	667.925

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Di Provinsi Sumatera Barat, garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan selama 11 tahun terakhir. Fenomena peningkatan bisa terlihat dari garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat di tahun 2013 tercatat sebesar 305,502 rupiah/kapita/ bulan, lalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi 667.925 rupiah/kapita/bulan di tahun 2023 atau meningkat sebesar 118,63 persen. Dari tahun 2022 sampai 2023, garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 9,33 persen.

Menurut daerah tempat tinggal, perkotaan memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Garis kemiskinan perkotaan pada tahun 2023 meningkat

9,63 persen menjadi 682.515 rupiah per kapita per bulan dari yang sebelumnya 622.579 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2022. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2023, garis kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 105,06 persen. Jika kita melihat wilayah perdesaan, garis kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 598.431 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi 652.709 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 9,07 persen. Kemudian dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, garis kemiskinan perdesaan mengalami peningkatan sebesar 126,47 persen.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai 2023 terus berfluktuasi, hanya saja persentasenya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, tercatat sebanyak 411,12 ribu penduduk yang tergolong miskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,14 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2013 sebanyak 290,52 ribu dan di perkotaan sebanyak 120,60 ribu penduduk. Dengan kata lain, daerah perdesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 340,37 ribu dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,95 persen. Menurut daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 13,19 ribu penduduk dibandingkan tahun 2013 menjadi 133,79 ribu penduduk, tetapi tingkat kemiskinannya mengalami penurunan dari 6,16 persen pada tahun 2013 menjadi 4,67 persen pada tahun 2023. Jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2023 dari 290,52 ribu menjadi 206,57 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan dari 9,39 persen menjadi 7,23 persen.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak 72,78 ribu penduduk dibandingkan di perkotaan. Hal ini merupakan fenomena yang umum mengingat penduduk di perdesaan lebih banyak jumlahnya dibanding di perkotaan. Fenomena tingginya kemiskinan di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan di Provinsi Sumatera Barat juga mencerminkan pola umum yang terjadi di Indonesia. Penduduk yang tinggal di perdesaan cenderung lebih banyak daripada di perkotaan, dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi modern, rendahnya nilai tambah produk pertanian, serta ketidakpastian harga komoditas, yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di daerah perdesaan.

Di Provinsi Sumatera Barat, meskipun sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian di beberapa kabupaten, produktivitas pertanian masih relatif rendah. Selain itu, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan di daerah pedesaan juga sering kali terbatas, yang turut memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Faktor lainnya termasuk ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, minimnya akses ke lapangan pekerjaan yang lebih beragam, dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan di luar sektor pertanian.

Tabel 7.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan), 2013–2023

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan-Perdesaan (K+D)	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	120,60	6,16	290,52	9,39	411,12	8,14
2014	108,08	5,43	271,12	8,68	379,20	7,41
2015	118,03	5,73	261,58	8,35	379,61	7,31
2016	118,96	5,54	252,59	8,16	371,56	7,09
2017	113,01	5,14	251,5	8,1	364,51	6,87
2018	114,84	4,86	242,29	8,07	357,13	6,65
2019	121,35	4,76	226,87	7,88	348,22	6,42
2020	128,12	4,97	216,11	7,43	344,23	6,28
2021	145,58	5,3	225,09	7,91	370,67	6,63
2022	137,61	4,95	197,6	6,86	335,21	5,92
2023	133,79	4,67	206,57	7,23	340,37	5,95

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024. *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024. *Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2019-2023*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024. *Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat 2019-2023*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat menurut Pengeluaran 2019 - 2023*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat
- Bank Indonesia. (2024). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA)*. Diakses pada 3 Oktober 2024, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=13>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2024. *Laporan realisasi anggaran 2023*. Diakses dari <https://bpkad.sumbarprov.go.id/Home/baca/ea93e641fcd6a96859ac7650e41f54a> pada 3 Oktober 2024.
- Kahn, Joel S. 1993. *Merantau: The Minangkabau Experience*. Providence: Berg Publishers

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, 25137
Telp: (0751) 442158, 442159 Email: sumbar@bps.go.id
Homepage: <https://www.sumbar.bps.go.id>

ISSN 2477-0817



9 772477 081240 >